

MODUL

PUBLIC SPEAKING

PROFESIONAL, MANAJEMEN DIGITAL PUBLIC RELATION DAN PENANGANAN MEDIA SAAT KRISIS



10 JP (450 Menit)


**PENDAHULUAN**


Di era keterbukaan informasi dan kecepatan penyebaran berita melalui platform digital, citra Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi hanya ditentukan oleh kinerja operasional di lapangan, tetapi juga oleh kemampuan pimpinan Polri dalam berkomunikasi secara profesional dan strategis kepada publik. Seorang perwira tinggi Polri kini tidak hanya dituntut mampu memimpin satuan dan mengambil keputusan taktis, tetapi juga harus menjadi juru bicara yang meyakinkan, pengelola narasi yang cerdas, serta penyelamat reputasi institusi ketika krisis menerpa. Ketiga kompetensi tersebut — *Public Speaking* profesional, manajemen *Digital Public Relation*, dan penanganan media saat krisis — telah menjadi “senjata soft power” yang sama pentingnya dengan kemampuan hard power di medan operasi.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi publik secara drastis. Saat ini, satu video berdurasi 15 detik yang diunggah warga dapat menjadi trending topic nasional dalam hitungan menit dan memicu tekanan publik yang masif terhadap institusi Polri. Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap Polri yang fluktuatif menuntut pimpinan di semua level memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, empatik, dan berwibawa, sekaligus mampu mengelola percakapan di ranah digital serta meredam potensi krisis sebelum membesar. Ketidakmampuan dalam ketiga bidang ini berpotensi menggerus legitimasi institusi meskipun kinerja operasional sesungguhnya baik.


Oleh karena itu, mata pelajaran *Public Speaking* Profesional, Manajemen *Digital Public Relation*, dan Penanganan Media Saat Krisis dirancang khusus bagi peserta didik Sespimmen Polri sebagai bekal strategis menghadapi tantangan kepemimpinan di era society 5.0 dan revolusi informasi. Melalui penguasaan ketiga kompetensi ini, para

	<p>calon pimpinan menengah Polri diharapkan mampu membangun dan memelihara kepercayaan publik, mengelola narasi positif institusi di ranah digital, serta menangani krisis komunikasi dengan tenang, cepat, dan tepat sehingga citra dan marwah Polri sebagai pengayom masyarakat tetap terjaga di segala kondisi. Ketiga mata pelajaran ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi seorang pemimpin Polri modern.</p>
--	--


	<p>STANDAR KOMPETENSI</p>
	<p>Menganalisis secara terintegrasi situasi komunikasi krisis Kepolisian serta merumuskan strategi komunikasi yang tepat, cepat, dan berwibawa untuk melindungi serta memulihkan citra dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.</p>

	<p>KOMPETENSI DASAR</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis fondasi <i>Public Speaking</i> profesional untuk pemimpin wilayah. <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menguraikan konsep <i>public speaking</i>. b. Menganalisis prinsip dasar <i>Public Speaking</i> untuk <i>Middle leaders</i>. c. Menganalisis struktur pesan publik <i>dan</i> teknik penyampaian efektif. d. Menganalisis etika berbicara di depan publik <i>dan</i> pengelolaan persepsi. 2. Menganalisis komunikasi digital dan manajemen <i>Public Relation</i> berbasis media sosial <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menguraikan konsep dan fungsi <i>digital Public Relation</i> Polri. b. Mengidentifikasi prinsip dasar <i>Digital Public Relation</i> polri. c. Mengembangkan manajemen konten digital institusional. d. Melakukan pengendalian narasi digital dan deteksi dini opini publik.


	<p>3. Melakukan penanganan media saat krisis (<i>Crisis Media Handling</i>)</p> <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menguraikan konsep dan fungsi komunikasi krisis. b. Menentukan prinsip komunikasi krisis c. Mengelola teknik berinteraksi dengan wartawan <i>dan</i> media broadcast saat krisis d. Mengimplementasikan taktis stabilisasi reputasi pada krisis tingkat wilayah <p>4. Mengaplikasikan <i>Public Speaking</i>, <i>digital Public Relation</i>, dan manajemen media dalam operasi kepolisian</p> <p>Indikator hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menguraikan konsep dan fungsi <i>public speaking</i> dalam operasi kepolisian. b. Melakukan <i>Public Speaking</i> dalam operasi kepolisian. c. Mengimplementasikan komunikasi digital terintegrasi dengan operasi. d. Mengidentifikasi simulasi <i>crisis communication (tabletop exercise)</i>.
--	--

	<p>MATERI PELAJARAN</p> <p>1. Pokok Bahasan 1: Fondasi <i>Public Speaking</i> Profesional untuk Pemimpin Wilayah.</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep <i>public speaking</i> b. Prinsip Dasar <i>Public Speaking</i> untuk <i>Middle leaders</i>. c. Struktur Pesan Publik dan Teknik Penyampaian Efektif. d. Etika Berbicara di Depan Publik dan Pengelolaan Persepsi. <p>2. Pokok Bahasan 2: Komunikasi Digital dan Manajemen <i>Public Relation</i> Berbasis Media Sosial</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep dan fungsi <i>digital Public Relation</i> Polri
---	--


	<ul style="list-style-type: none"> b. Prinsip Dasar <i>Digital Public Relation</i> Polri. c. Manajemen Konten Digital Institusional. d. Pengendalian Narasi Digital dan Deteksi Dini Opini Publik <p>3. Pokok Bahasan 3: Penanganan Media Saat Krisis (<i>Crisis Media Handling</i>)</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konsep dan fungsi komunikasi krisis. b. Prinsip Komunikasi Krisis c. Teknik Berinteraksi dengan Wartawan dan <i>Media Broadcast</i> Saat Krisis d. Taktis Stabilisasi Reputasi pada Krisis Tingkat Wilayah <p>4. Pokok Bahasan 4: <i>Public Speaking</i>, Digital PR, dan Manajemen Media dalam Operasi Kepolisian</p> <p>Sub Pokok Bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konsep dan fungsi <i>public speaking</i> dalam operasi kepolisian. b. <i>Public Speaking</i> dalam Operasi Kepolisian. c. Komunikasi Digital Terintegrasi dengan Operasi. a. Simulasi Crisis Communication (<i>Tabletop Exercise</i>).
--	---

	<h2>METODE PEMBELAJARAN</h2>
	<p>1. Metode Ceramah</p> <p>Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang <i>Public Speaking</i> Profesional, Manajemen <i>Digital Public Relation</i> dan Penanganan Media Saat Krisis.</p> <p>2. Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat)</p> <p>Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan.</p> <p>3. Pembelajaran Kooperatif (<i>Cooperative Learning</i>)</p> <p>Metode ini digunakan untuk mendorong interaksi sosial, saling ketergantungan positif, dan pengembangan keterampilan sosial serta kognitif melalui kerja sama dalam kelompok.</p>


	<p>4. Metode <i>Problem Based Learning</i></p> <p>Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dengan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah sebagai cara untuk mengembangkan pemahaman konsep dan keterampilan kritis.</p> <p>5. Metode <i>Project Based Learning</i></p> <p>Metode ini bertujuan untuk mengembangkan proyek yang signifikan, yang menekankan pada pemecahan masalah, kolaborasi, dan keterampilan praktis.</p> <p>6. Metode Penugasan</p> <p>Metode ini bertujuan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume terkait materi yang disampaikan.</p>
--	--


	<p>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</p>
	<p>1. Alat/Media:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard.</i> b. <i>Flipchart.</i> c. Komputer/laptop. d. LCD dan <i>screen.</i> e. <i>Laser point.</i> f. Pengeras suara/<i>sound system.</i> <p>2. Bahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas. b. Alat tulis. <p>3. Sumber Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Coombs, W. T. (2019). <i>Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding</i> (5th ed.). SAGE Publications. b. Ulmer, R. R., Sellnow, T. L., dan Seeger, M. W. (2019). <i>Effective Crisis Communication: Moving from Crisis to Opportunity</i> (4th ed.). SAGE Publications.


- c. Fearn-Banks, K. (2017). *Crisis Communications: A Casebook Approach* (5th ed.). Routledge.

	<h2 style="text-align: center;">KEGIATAN PEMBELAJARAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal : 10 menit Pendidik melakukan apersepsi, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam. b. Perkenalan. c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. 2. Tahap inti : 430 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap inti I: pembahasan materi <i>Public Speaking Profesional, Manajemen Digital Public Relation dan Penanganan Media Saat Krisis.</i> (180 menit) <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara) mengeksplor pengalaman terkait materi yang disampaikan kegiatan tanya jawab. 2) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan analisis terkait materi yang disampaikan. b. Tahap inti II: diskusi materi <i>Public Speaking Profesional, Manajemen Digital Public Relation dan Penanganan Media Saat Krisis.</i> (250 menit) <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik melalui Pokjar masing-masing untuk mendiskusikan tentang materi yang disampaikan 2) Pendidik (Widyaiswara) menunjuk salah satu Pokjar untuk mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh Pokjar lain. 3) Pendidik (Widyaiswara) memberikan ulasan dan penguatan materi yang disampaikan. 4) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik secara perorangan untuk membuat resume dan laporan hasil diskusi materi yang disampaikan.

	<p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <p>Pendidik (Widyaiswara) mengakhiri kegiatan pembelajaran, yang mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan penguatan materi, dengan cara memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Menjelaskan keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. c. Menyampaikan tindaklanjut dari kegiatan pembelajaran dalam bentuk penugasan dan sebagainya.
--	--

	<p>TAGIHAN / TUGAS</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan. 2. Peserta didik mengumpulkan tugas NKP 1 sesuai dengan PPKT dalam bentuk pdf di <i>upload</i> ke aplikasi SIAP.

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan. 2. Resume dengan tulisan tangan sesuai dengan PPKT.

	<p>BAHAN BACAAN</p>
	<p style="text-align: center;">POKOK BAHASAN 1</p> <p style="text-align: center;">FONDASI <i>PUBLIC SPEAKING</i> PROFESIONAL UNTUK PEMIMPIN WILAYAH</p> <p>Keberhasilan seorang pemimpin wilayah dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kapasitas manajerial, kemampuan analitis, atau kompetensi operasional semata, tetapi juga oleh kemampuan komunikasi publik yang kuat, terstruktur, dan meyakinkan. Di era karakteristik keamanan yang semakin kompleks, cepat berubah, dan sangat dipengaruhi dinamika opini publik, kemampuan berbicara di hadapan masyarakat, media, lintas instansi, dan forum strategis menjadi fondasi utama efektivitas kepemimpinan.</p> <p><i>Public Speaking</i> bagi seorang Perwira Menengah Polri bukan sekadar keterampilan tampil di depan umum. Ia merupakan instrumen taktis untuk membangun legitimasi, meningkatkan kepercayaan, mengelola persepsi publik, mengkomunikasikan kebijakan secara akurat, serta menjaga stabilitas sosial–keamanan di wilayah. Pemimpin wilayah dituntut dapat menyampaikan pesan secara jernih, tenang, adaptif terhadap audiens, serta mampu mengendalikan narasi di tengah situasi krisis maupun tekanan operasional.</p> <p>Fondasi <i>Public Speaking</i> profesional meliputi penguasaan struktur pesan, teknik vokal, bahasa tubuh, manajemen emosi, hingga strategi retorika persuasif yang relevan dengan konteks Polri. Pada level kepemimpinan menengah, kemampuan ini menjadi bagian dari kompetensi inti, mengingat setiap perwira yang memimpin satker atau wilayah akan menjadi wajah institusi, penentu arah komunikasi, dan penanggung jawab hubungan dengan publik. Keterampilan berbicara yang buruk dapat menimbulkan mispersepsi, ketegangan sosial, bahkan menggerus kepercayaan masyarakat; sebaliknya, komunikasi publik yang tepat dan profesional mampu meningkatkan stabilitas kamtibmas, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memulihkan kepercayaan pada situasi sulit.</p> <p>Materi ini akan mengurai prinsip, teknik, serta praktik <i>Public Speaking</i> yang aplikatif bagi pemimpin wilayah, mulai dari penyusunan pesan operasional, penyampaian informasi sensitif, pengelolaan konferensi pers, hingga manajemen komunikasi pada situasi darurat. Dengan penguasaan fondasi <i>Public Speaking</i> profesional, para peserta Sespimen diharapkan mampu menjadi komunikator strategis yang</p>

kredibel, berintegritas, dan efektif dalam menjalankan mandat kepemimpinan Polri.

A. Konsep *Public Speaking*

Public Speaking pada dasarnya adalah kemampuan menyampaikan pesan secara lisan kepada sekelompok audiens dengan tujuan memengaruhi cara pandang, membangun pemahaman bersama, dan mengarahkan respons audiens terhadap suatu isu. Dalam kepemimpinan kewilayahan Polri, *Public Speaking* berperan sebagai instrumen strategis yang tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga mengelola persepsi publik, memperkuat legitimasi kebijakan, dan meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah.

Secara konseptual, *Public Speaking* mencakup beberapa elemen inti: pemahaman tentang karakter audiens, kejelasan tujuan komunikasi, penguasaan struktur pesan, kemampuan menyusun narasi yang logis, serta penggunaan vokal, intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang selaras dengan situasi. *Public Speaking* bukan semata estetika bicara, tetapi merupakan tindakan kepemimpinan, karena seorang pemimpin wilayah selalu berbicara dengan membawa mandat institusi, tanggung jawab keamanan, dan ekspektasi sosial yang besar. Ketika seorang perwira berbicara dalam forum publik, setiap kata menjadi representasi institusi dan dapat memengaruhi dinamika sosial–keamanan.

Fungsi *Public Speaking* bagi pemimpin wilayah meliputi berbagai aspek strategis.

1. Fungsi informatif menjadi yang paling mendasar

Hal tersebut menjadi yang paling mendasar, yakni menyampaikan data, fakta, dan arahan yang diperlukan masyarakat untuk memahami situasi keamanan atau kebijakan kepolisian. Pada saat yang sama, *Public Speaking* juga memiliki fungsi persuasif, di mana pemimpin wilayah berperan membentuk perilaku publik agar mendukung program keamanan, menaati peraturan, dan ikut serta dalam menjaga ketertiban.

2. Fungsi regulatif, yaitu mengarahkan tindakan publik pada momen-momen sensitif seperti bencana, konflik sosial, atau gangguan kamtibmas. Pada situasi tersebut, pemimpin wilayah harus mampu berbicara dengan otoritas moral dan kecermatan agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman. Kemampuan memberi penjelasan yang menenangkan, jelas, dan terukur menjadi bagian dari fungsi kritical ini.

	<p>3. Fungsi sebagai alat membangun kepercayaan.</p> <p>Dalam lingkungan yang dinamis dan rentan terhadap misinformasi, pemimpin wilayah harus mampu menciptakan citra profesional, transparan, dan bertanggung jawab melalui komunikasi publiknya. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui tindakan, tetapi juga melalui cara pemimpin berbicara: pilihan kata, ketegasan, empati, dan konsistensi pesan.</p> <p>4. Fungsi representatif</p> <p>Di mana seorang pemimpin wilayah menjadi wajah institusi dalam berbagai forum, baik di tingkat pemerintahan daerah, komunitas masyarakat, maupun media. Melalui <i>Public Speaking</i> yang baik, pemimpin dapat memperkuat hubungan lintas sektor, memfasilitasi kolaborasi, serta memperluas jejaring dukungan bagi program keamanan kawasan.</p> <p>5. Fungsi edukatif</p> <p>Pemimpin wilayah sering menjadi sumber edukasi publik terkait hukum, etika berlalu lintas, pencegahan kejahatan, atau bahaya narkoba. Melalui komunikasi publik yang terstruktur, masyarakat dapat memahami isu-isu keamanan secara lebih baik dan terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.</p> <p>6. Fungsi fungsi stabilisasi.</p> <p>Pada situasi krisis atau isu sensitif, <i>Public Speaking</i> menjadi sarana mengendalikan narasi. Dengan pesan yang tepat dan penyampaian yang terukur, pemimpin wilayah dapat meredakan kecemasan, mencegah eskalasi, dan mengembalikan stabilitas sosial.</p> <p>Dengan demikian, konsep dan fungsi <i>Public Speaking</i> saling terkait dalam membentuk kemampuan komunikasi yang menjadi fondasi kepemimpinan wilayah. <i>Public Speaking</i> bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kapasitas strategis yang memengaruhi persepsi publik, legitimasi institusi, serta efektivitas pelaksanaan tugas-tugas keamanan di tingkat kewilayahan. Pemimpin yang menguasai <i>Public Speaking</i> tidak hanya mampu berbicara dengan baik, tetapi mampu menggerakkan, menenangkan, dan mengarahkan publik demi terciptanya keamanan yang berkelanjutan.</p> <p>B. Prinsip Dasar <i>Public Speaking</i> untuk <i>Middle leaders</i></p> <p>Prinsip dasar <i>Public Speaking</i> bagi seorang <i>Middle leader</i>, khususnya perwira menengah Polri, bukan sekadar kemampuan berbicara di depan umum, tetapi merupakan alat strategis untuk</p>
--	---

membangun kepemimpinan yang berwibawa, kredibel, dan inspiratif. Di tingkat perwira menengah, *Public Speaking* berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah yang sangat krusial. *Middle leader* berada pada posisi “sandwich layer”: menerjemahkan visi dan kebijakan pimpinan tinggi kepada anggota di lapangan sekaligus menyampaikan aspirasi, kondisi emosional, dan kebutuhan personel kepada pejabat di level atas. Dengan demikian, kualitas komunikasi yang ditampilkan akan menentukan apakah pesan pimpinan dapat dieksekusi secara tepat, diterima dengan komitmen, dan diinternalisasi oleh anggota.

Public Speaking menjadi instrumen kepemimpinan yang menegakkan otoritas, memperkuat legitimasi, serta membangun hubungan psikologis dengan audiens internal maupun eksternal. Karena itu, konsepnya harus dipahami bukan sebagai kemampuan teknis, tetapi sebagai kompetensi strategis yang membentuk persepsi, memengaruhi perilaku, dan mengarahkan dinamika organisasi.

1. Fondasi Retorika: Ethos, Pathos, dan Logos

Prinsip pertama *Public Speaking* yang harus dikuasai *Middle leader* Polri berakar pada teori retorika Aristoteles yang membagi kekuatan komunikasi menjadi tiga elemen: ethos, pathos, dan logos (Kennedy, 2007). Ketiga elemen ini saling menguatkan dan wajib hadir secara seimbang agar pesan tidak hanya didengar, tetapi juga dipercaya serta diikuti.

Ethos adalah kredibilitas pembicara — fondasi utama bagi seorang perwira. Dalam konteks Polri, ethos tidak hanya berasal dari pangkat dan seragam, tetapi juga integritas personal, rekam jejak, ketenangan sikap, serta konsistensi antara perkataan dan tindakan. Audiens internal, terutama anggota di lapangan, sangat peka terhadap ketidakselarasan antara instruksi dan perilaku pemimpin. Ethos yang kuat membuat pesan lebih mudah diterima, bahkan dalam situasi penuh tekanan.

Pathos berkaitan dengan kemampuan menyentuh sisi emosional audiens. Bagi *Middle leader* Polri, pathos berarti menunjukkan empati kepada anggota, memahami tekanan psikologis anggota yang bertugas di garis depan, serta membaca suasana hati masyarakat yang sedang mengalami konflik, ketegangan, atau ketidakpastian. *Public Speaking* yang mampu membangkitkan rasa dihargai, dimengerti, dan didengar akan menciptakan kedekatan emosional yang diperlukan dalam memimpin situasi sosial yang kompleks.

	<p>Logos adalah logika, data, dan argumentasi rasional. Dalam konteks tugas kepolisian, logos diwujudkan melalui penyampaian fakta hukum, dasar kewenangan, situasi kamtibmas, analisis ancaman, dan alur kebijakan yang jelas. <i>Middle leader</i> Polri harus mampu mengemas data operasional menjadi pesan yang ringkas, akurat, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan atau bias persepsi. Kombinasi ethos, pathos, dan logos menjadikan pesan memiliki kekuatan persuasi yang utuh dan efektif.</p> <p>2. Prinsip Audiens-Sentris dan <i>Situational Leadership Communication</i></p> <p>Prinsip kedua adalah kemampuan menerapkan pendekatan audience-centered speaking dan <i>Situational Leadership Communication</i>. Lucas (2021) menegaskan bahwa pembicara yang efektif selalu menyesuaikan isi pesan, bahasa, dan gaya penyampaian dengan karakter audiens. <i>Middle leader</i> Polri berhadapan dengan spektrum audiens yang sangat luas dan heterogen, mulai dari anggota lapangan, tokoh agama, jurnalis, pejabat daerah, hingga masyarakat sipil dengan latar sosial yang berbeda-beda.</p> <p>Karena itu, gaya komunikasi tidak boleh seragam. Saat menyampaikan arahan kepada anggota Brimob yang sedang bersiap pengamanan unjuk rasa, bahasa yang tegas, langsung, dan berbasis instruksi menjadi pilihan tepat. Sementara dalam forum koordinasi lintas instansi, gaya komunikasi harus lebih analitis, kolaboratif, dan berorientasi solusi. Dalam dialog dengan warga, pendekatan humanis, empatik, dan menenangkan lebih efektif untuk menjaga kepercayaan publik.</p> <p>Kesesuaian gaya ini sejalan dengan teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard (dalam Northouse, 2021) yang membedakan empat gaya komunikasi: telling, selling, participating, dan delegating. Dalam apel pagi, gaya "telling" dengan instruksi langsung sangat efektif, tetapi dalam diskusi dengan masyarakat adat, gaya "participating" yang mengedepankan mendengarkan menjadi lebih berpengaruh. <i>Middle leader</i> yang gagal menyesuaikan gaya komunikasi dengan konteks sering memunculkan resistensi, kesalahpahaman, bahkan menurunkan kredibilitas kepemimpinan.</p> <p>3. Pengendalian Diri dan Komunikasi Non-Verbal</p> <p>Prinsip ketiga adalah kemampuan mengendalikan diri dan menata komunikasi non-verbal. Dale Carnegie (2017) menunjukkan bahwa dampak komunikasi dipengaruhi 55%</p>
--	--

oleh bahasa tubuh, 38% oleh kualitas suara, dan hanya 7% oleh kata-kata. Artinya, pesan yang hebat dapat runtuh jika disampaikan dengan postur yang buruk, ekspresi wajah gelisah, atau intonasi yang tidak stabil.

Middle leader Polri harus menghadirkan *commanding presence* — sebuah aura kepemimpinan yang memancarkan disiplin, ketegasan, dan ketenangan bahkan sebelum berbicara. Hal ini tercermin dalam postur tegap, gerakan tangan yang terkontrol, tatapan mata yang fokus, dan ekspresi yang seimbang antara ketegasan dan empati.

Kebiasaan negatif seperti berdiri membungkuk, memainkan benda di tangan, atau menghindari kontak mata dapat menurunkan wibawa dalam hitungan detik. Karena itulah latihan terstruktur sangat diperlukan: berlatih di depan cermin, merekam video saat memberi arahan, mengikuti simulasi apel atau konferensi pers, serta menerima umpan balik langsung dari instruktur. Pola latihan ini membentuk konsistensi perilaku non-verbal yang mendukung pesan verbal dan menegaskan kehadiran seorang pemimpin yang siap menghadapi kondisi apa pun.

C. Struktur Pesan Publik dan Teknik Penyampaian Efektif

Struktur pesan publik yang efektif dalam konteks kepemimpinan kepolisian tidak dapat dilepaskan dari fondasi retorika klasik Aristoteles, yang kemudian berevolusi melalui model-model komunikasi modern dan pendekatan praktis untuk situasi operasional. *Public Speaking* bagi perwira menengah Polri menuntut penyusunan pesan yang bukan hanya indah secara bahasa, tetapi juga presisi secara hukum, terukur secara operasional, dan mampu memengaruhi persepsi publik secara konstruktif. Dalam tugas kewilayahan, pesan publik bukan sekadar narasi informatif, melainkan instrumen strategis untuk membangun legitimasi, menjaga stabilitas, dan mengarahkan respons masyarakat.

1. Struktur Pesan: Integrasi Retorika Klasik, AIDA, dan 5W1H

Secara klasik, retorika Aristoteles membagi pidato menjadi pembukaan (*exordium*), penyampaian situasi (*narratio*), argumentasi (*confirmatio*), sanggahan (*refutatio*), dan penutup (*Peroratio*). Struktur ini kemudian dipadukan dengan model modern seperti AIDA (*Attention–Interest–Desire–Action*) yang menekankan alur psikologis audiens, serta pendekatan operasional 5W1H yang sangat relevan dalam komunikasi kepolisian.

	<p>Dalam konteks perwira <i>Middle leader</i>, struktur ideal meliputi tiga bagian utama:</p> <p>Pembukaan (<i>Exordium</i>). Bagian ini berfungsi untuk menarik perhatian, membangun kredibilitas, dan menetapkan konteks. Bagi Polri, pembukaan sangat penting untuk menegaskan ethos—bahwa pembicara adalah representasi institusi yang memiliki mandat hukum. Pembukaan dapat memuat salam hormat sebagai tanda disiplin, kutipan normatif tentang tugas negara, atau paparan singkat data terkini tentang situasi kamtibmas yang relevan. Kemampuan menarik perhatian dalam beberapa detik pertama menentukan apakah audiens akan mengikuti pesan hingga selesai.</p> <p>Isi Utama (<i>Narratio–Confirmatio–Refutatio</i>). Bagian ini berisi penjelasan lengkap tentang situasi dengan prinsip 5W1H: apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang terlibat, kapan, di mana, dan bagaimana Polri merespons. Perwira harus menyampaikan argumentasi yang logis, berbasis data, selaras dengan asas legalitas dan profesionalisme. Bagian ini juga dapat memuat antisipasi terhadap potensi kesalahpahaman, keraguan, atau kritik publik. Teknik <i>refutatio</i> sangat penting dalam konteks media sosial, di mana hoaks, framing negatif, dan interpretasi liar dapat berkembang sangat cepat.</p> <p>Penutup (<i>Peroratio</i>). Bagian penutup merangkum pesan inti, mempertegas komitmen Polri, dan memberikan ajakan bertindak (<i>call to action</i>) yang jelas. Penutup harus kuat, menenangkan, dan mengandung arah tindakan. Dalam konteks humas Polri, penutup yang baik mengembalikan kepercayaan publik, menegaskan netralitas institusi, dan memotivasi masyarakat untuk berkolaborasi menjaga keamanan.</p> <p>Struktur pesan publik Polri juga harus mematuhi prinsip Laswell (1948): “Who says what in which channel to whom with what effect.” Bagi Polri, <i>who</i> sangat menentukan, karena institusi memiliki otoritas hukum dan sosial. Jika pesan tidak menegaskan legitimasi sejak awal, maka ruang delegitimasi dapat terbuka dan dimanfaatkan oleh pihak lain (Habermas, 1984; Windahl et al., 2009).</p> <p>2. Teknik Penyampaian: NLP, Empati, dan Kepemimpinan Komunikatif</p> <p>Teknik penyampaian pesan bagi perwira Polri harus mampu menjembatani antara wibawa, rasionalitas, dan kedekatan emosional. Pendekatan ini menggabungkan prinsip neuro-</p>
--	---

	<p>linguistic programming (NLP), komunikasi berbasis empati, dan standar etika komunikasi Polri.</p> <p>Aspek Nonverbal. Mehrabian (1971) menekankan bahwa 55–65% efektivitas pesan ditentukan bahasa tubuh. Perwira menengah harus mampu menghadirkan postur tegap namun tidak mengintimidasi, kontak mata menyeluruh (triangulasi mata), dan ekspresi wajah yang stabil antara ketulusan, ketegasan, dan keseriusan. Nonverbal yang buruk—membungkuk, menghindari kontak mata, atau gestur gelisah—dapat memutus kepercayaan publik meskipun isi pesan sangat baik.</p> <p>Teknik Vokal. Variasi intonasi menjadi kunci agar pesan tidak monoton. Pitch (tinggi-rendah suara), pace (kecepatan bicara), dan power (kekuatan suara) harus disesuaikan dengan konteks audiens. Prinsip “primacy–recency effect” menyatakan bahwa audiens paling mengingat apa yang disampaikan di awal dan di akhir. Karena itu, pesan inti harus diletakkan pada dua titik tersebut.</p> <p>Penggunaan Bahasa: Prinsip 3B Polri. Bahasa yang digunakan harus Benar (akurasi hukum dan istilah), Baik (ramah, tidak provokatif), dan Bijak (mengedepankan keharmonisan sosial). Bahasa teknis seperti “lidik–sidik” perlu diterjemahkan menjadi “penyelidikan dan penyidikan” agar mudah dipahami publik. Tannen (1998) dan penelitian Kopolnas (2022) menunjukkan bahwa masyarakat lebih menerima pesan Polri yang menggunakan bahasa inklusif seperti “kita bersama menjaga keamanan” dibandingkan bahasa instruksi yang kaku.</p> <p>Framing Positif. Teknik framing penting agar pesan membangkitkan rasa aman, bukan ketakutan. Misalnya, “Polri hadir melindungi masyarakat” lebih efektif daripada “Polri menindak pelanggar,” karena fokusnya pada nilai proteksi, bukan hukuman.</p> <p>3. Komunikasi Krisis dan Era Digital: SCCT, 3T, dan Message Mapping</p> <p>Tantangan terbesar perwira Polri saat ini adalah kecepatan informasi. Media sosial dan citizen journalism menuntut respons yang cepat, akurat, dan terkendali. Dalam situasi krisis, kesalahan komunikatif dapat memperburuk eskalasi bahkan menciptakan distrust publik.</p> <p>Model SCCT (Coombs, 2015) memberikan tiga kerangka respons:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Denial, ketika tuduhan tidak benar;
--	---

	<p>b. Diminish, jika kesalahan kecil namun perlu klarifikasi;</p> <p>c. Rebuild, jika terjadi kesalahan serius dan perlu permintaan maaf disertai tindakan korektif.</p> <p>Dalam semua kasus, prinsip 3T Polri (Terbuka, Transparan, Tertib) wajib dijalankan dalam “golden hour” 1x24 jam untuk mencegah pihak lain menguasai narasi. Perwira yang lambat merespons akan kehilangan kendali atas persepsi publik.</p> <p>Teknik message mapping (Covello, 2008) membantu menyusun pesan saat tekanan tinggi: setiap isu diringkas menjadi tiga pesan kunci, masing-masing maksimal 27 kata, yang dapat diucapkan dalam 9 detik. Teknik ini sangat cocok untuk konferensi pers, wawancara live, atau penanganan isu viral.</p> <p>Kombinasi antara struktur pesan yang logis, teknik penyampaian yang empatik dan berwibawa, serta kecepatan adaptasi dalam ekosistem digital menjadikan <i>Public Speaking</i> sebagai kompetensi strategis yang menentukan keberhasilan Polri dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 2 Tahun 2002 bahwa Polri harus senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan profesionalitas dan transparansi.</p> <p>D. Etika Berbicara di Depan Publik dan Pengelolaan Persepsi</p> <p>Etika berbicara di depan publik bagi seorang perwira Polri tidak dapat dipahami sebagai sekadar kemampuan menyampaikan pesan dengan baik, melainkan sebagai tindakan moral, tanggung jawab hukum, dan representasi institusional. Dalam setiap pernyataan publik, seorang perwira membawa tiga identitas sekaligus: dirinya sebagai individu, dirinya sebagai pejabat negara, dan dirinya sebagai representasi institusi penegak hukum. Karena itu, setiap kata yang diucapkan bukan hanya memiliki implikasi komunikasi, tetapi juga konsekuensi hukum, politik, dan sosial yang sangat luas.</p> <p>Secara normatif, etika berbicara perwira Polri bersandar pada amanat UU No. 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang menegaskan kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan institusi Polri. Ketentuan ini mengandung makna bahwa ucapan perwira harus mencerminkan profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian. Ketika seorang Kapolsek, Kapolres, atau Kapolda berbicara di media, ia sedang menjalankan fungsi negara dalam bentuk komunikasi publik, bukan sekadar menyampaikan opini pribadi.</p>
--	---

	<p>1. Pilar Etika Berbicara dalam Kerangka Hukum dan Profesi Polri</p> <p>Terdapat empat pilar utama etika berbicara yang wajib dijunjung setiap perwira:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kejujuran dan akurasi informasi. Perwira Polri tidak boleh menyampaikan informasi yang belum diverifikasi, terlebih hoaks atau spekulasi. Kesalahan penyampaian dapat menimbulkan kepanikan, bias persepsi, bahkan memperkeruh proses penegakan hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berimplikasi pada sanksi disiplin dan pidana. b. Penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Pasal 8 ayat (2) KUHAP mewajibkan penegak hukum untuk tidak menyudutkan seseorang sebagai pelaku sebelum ada pembuktian. Dalam ranah publik, pelanggaran prinsip ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga melanggar prinsip fairness dan dapat memicu gugatan hukum. c. Netralitas politik. Pasal 28 UU Polri serta Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang KEPP menjelaskan bahwa anggota Polri dilarang menunjukkan keberpihakan politik dalam pernyataan publik. Kalimat yang ambigu atau bernuansa politis dapat dengan cepat dimanipulasi, menimbulkan persepsi partisan, dan mencederai legitimasi institusi. d. Keempat, sensitivitas budaya dan keragaman sosial. Perwira Polri wajib menjaga bahasa agar tidak memicu sentimen suku, agama, ras, atau golongan. Kesalahan kecil dalam pilihan kata dapat memicu konflik horizontal atau memengaruhi hubungan harmonis antara Polri dan komunitas lokal. <p>Pelanggaran etika berbicara dapat menyebabkan sanksi mulai dari teguran hingga pidana, misalnya melalui Pasal 310–321 KUHP tentang pencemaran nama baik atau Pasal 14–15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang berita bohong.</p> <p>2. Pengelolaan Persepsi sebagai Fungsi Strategis Kepemimpinan Polri</p> <p>Etika berbicara tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengelola persepsi publik. Di era media sosial, persepsi publik tidak hanya dipengaruhi oleh fakta, tetapi juga oleh narasi, framing, dan kecepatan informasi. McCombs dan</p>
--	--

	<p>Shaw (1972) dalam teori Agenda Setting menunjukkan bahwa aktor publik dapat menentukan <i>isu apa</i> yang dianggap penting oleh masyarakat. Entman (1993) dalam <i>Framing Theory</i> menjelaskan bahwa cara isu dipresentasikan menentukan <i>bagaimana masyarakat memaknainya</i>.</p> <p>Bagi Polri, ini berarti setiap pernyataan seorang perwira adalah bagian dari konstruksi opini publik tentang profesionalisme, integritas, dan transparansi institusi. Oleh karena itu, Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2021 mewajibkan setiap unsur humas dan pimpinan untuk menerapkan strategic communication yang cepat, transparan, dan terukur.</p> <p>Teknik yang dianjurkan dalam lingkungan Sespimmen meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahasa inklusif dan humanis. Hindari frasa defensif seperti “itu bukan tugas kami”. Gunakan bahasa kolaboratif: <i>“Kami sedang menangani dan berkoordinasi untuk memastikan keamanan bersama.”</i> b. Teknik bridging. Ketika menghadapi pertanyaan sensitif, alihkan secara elegan ke pesan inti yang harus ditekankan. Bridging bukan menghindar, tetapi menjaga fokus narasi. c. Penghindaran jargon teknis. Istilah seperti “lidik–sidik” atau “restoratif justice” harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami publik. d. Koordinasi institusional. Dalam kasus viral atau berisiko tinggi, perwira wajib berkoordinasi dengan Divisi Humas Polri agar tidak terjadi pernyataan yang saling bertentangan atau tidak tepat konteks. <p>Pengelolaan persepsi juga mencakup kemampuan membaca risiko—bahwa satu kalimat dapat viral dalam hitungan menit dan menimbulkan kerusakan reputasi institusi yang jauh lebih besar daripada tujuan awal penyampaian informasi.</p> <p>3. Integrasi Etika Berbicara dan Persepsi Publik dalam Kepemimpinan Strategis Polri</p> <p>Dalam praktik kepemimpinan strategis, etika berbicara dan pengelolaan persepsi menjadi bagian integral dari konsep Predictive, Responsive, dan Transparent Policing (Perpol No. 1 Tahun 2022). Artinya, seorang perwira tidak hanya bereaksi terhadap isu, tetapi dapat memprediksi bagaimana</p>
--	---

	<p>kata-katanya akan dipahami, direspons, dan diinterpretasi dalam ruang publik.</p> <p>Studi Lemhannas RI (2023) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sangat berkorelasi dengan kualitas komunikasi publik pimpinan. Komunikasi yang akurat, empatik, dan konsisten menciptakan persepsi institusi yang kompeten dan dapat dipercaya. Sebaliknya, komunikasi yang defensif, emosional, atau tidak sinkron akan mempercepat penurunan kepercayaan publik.</p> <p>Dalam konteks ini, setiap peserta Sespimmen harus memahami bahwa <i>Public Speaking</i> bukan hanya seni retorika, tetapi alat kekuasaan simbolik yang dapat memperkuat atau meruntuhkan legitimasi institusi. Seorang pemimpin Polri yang menguasai etika berbicara dan persepsi publik akan mampu menenangkan massa dalam situasi krisis, membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan, serta melindungi reputasi institusi.</p> <p>Pada akhirnya, dalam demokrasi digital yang serba cepat, benar adanya bahwa “kata-kata perwira Polri adalah senjata yang lebih tajam daripada laras senjata”—karena ia membentuk apa yang masyarakat pikirkan, rasakan, dan percayai tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Contoh Kesalahan Etika Komunikasi dalam Praktik Kepemimpinan Polri</p> <p>Kesalahan etika komunikasi bukan hanya terjadi karena ketidaktahuan, tetapi sering muncul karena tekanan situasi, kurangnya kontrol emosional, atau miscalculasi dampak publik dari suatu pernyataan. Dalam konteks kepolisian, kesalahan kecil dapat menjadi pemicu krisis reputasi, memicu viral negatif, dan membuka ruang delegitimasi terhadap institusi. Berikut beberapa bentuk kesalahan yang sering muncul beserta ilustrasi kasusnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berbicara sebelum data terverifikasi (misi nformasi) <p>Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Perwira tergesa-gesa memberikan keterangan awal kepada media tanpa menunggu hasil penyelidikan.</p> <p>Contoh kasus: Dalam sebuah insiden penembakan di wilayah tertentu, seorang pejabat lapangan langsung menyatakan bahwa pelaku adalah “kelompok tertentu” tanpa bukti lengkap. Beberapa jam kemudian, penyelidikan membuktikan bahwa pelaku adalah individu dengan motif pribadi. Pernyataan awal tersebut memicu keresahan, memperburuk stigma</p>
--	---

	<p>kelompok, dan memaksa institusi melakukan klarifikasi berulang.</p> <p>Kesalahan etis: melanggar prinsip akurasi dan berpotensi menyesatkan publik. Implikasi: hilangnya kepercayaan publik, potensi tuntutan hukum, dan sanksi disiplin.</p> <p>2. Melanggar asas praduga tak bersalah</p> <p>Kesalahan ini terjadi ketika perwira secara eksplisit menyebut seseorang sebagai “pelaku” sebelum diputuskan oleh pengadilan.</p> <p>Contoh kasus: Dalam konferensi pers sebuah kasus pencurian, seorang pejabat menyebut tersangka “pasti pelaku utama”, padahal penyidikan masih berjalan. Frasa “pasti pelaku” dianggap publik sebagai penghakiman dini, sehingga tersangka menuntut balik karena pencemaran nama baik.</p> <p>Kesalahan etis: menyalahi Pasal 8 ayat (2) KUHP dan asas fair trial. Implikasi: gugatan perdata/pidana, pelanggaran kode etik, dan kerusakan kredibilitas institusi.</p> <p>3. Menggunakan bahasa yang merendahkan, emosional, atau tidak sensitif</p> <p>Bahasa yang kasar atau merendahkan martabat orang lain dapat memicu konflik sosial.</p> <p>Contoh kasus: Saat merespons keluhan warga yang viral, seorang pejabat berkata di media, “Warga itu tidak paham aturan, makanya ribut.” Ucapan ini memancing kemarahan masyarakat dan memunculkan opini bahwa Polri tidak menerima kritik.</p> <p>Kesalahan etis: tidak menunjukkan empati, melukai harga diri masyarakat, memicu resistensi. Implikasi: viral negatif, pemanggilan klarifikasi, dan menurunnya citra humanis Polri.</p> <p>4. Ketidaksensitifan budaya dan agama</p> <p>Pernyataan publik yang tidak mempertimbangkan keragaman budaya dapat memicu konflik horizontal.</p> <p>Contoh kasus: Dalam forum dialog lintas agama, seorang pejabat menggunakan analogi yang tidak sensitif terhadap tradisi lokal, sehingga dianggap melecehkan kelompok tertentu.</p>
--	---

	<p>Padahal niatnya bukan menghina, tetapi pilihan kata yang tidak tepat memperkeruh suasana.</p> <p>Kesalahan etis: mengabaikan keragaman sosial dan nilai lokal.</p> <p>Implikasi: protes kelompok masyarakat, kecaman publik, dan kebutuhan permintaan maaf institusional.</p> <p>5. Menyampaikan opini politik pribadi di ruang publik</p> <p>Netralitas adalah prinsip mutlak bagi Polri. Pernyataan yang bernuansa dukungan politik sangat berbahaya.</p> <p>Contoh kasus: Seorang perwira mengomentari situasi pemilu dengan menyebut, “Calon A lebih layak karena lebih tegas.” Kalimat ini segera viral dan dianggap sebagai keberpihakan institusi.</p> <p>Kesalahan etis: melanggar Pasal 28 UU Polri dan Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang KEPP.</p> <p>Implikasi: sanksi etik, pemeriksaan Propam, dan kerusakan kepercayaan publik.</p> <p>6. Defensif berlebihan atau menyalahkan publik</p> <p>Dalam situasi krisis, beberapa pejabat cenderung mengeluarkan pernyataan defensif yang justru memperburuk persepsi publik.</p> <p>Contoh kasus: Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas, seorang pejabat berkata: “Masyarakat harusnya lebih hati-hati, bukan salah anggota kami.” Pernyataan ini dicap arogan dan tidak empatik.</p> <p>Kesalahan etis: tidak memenuhi prinsip komunikasi humanis dan responsif.</p> <p>Implikasi: krisis reputasi, tekanan publik, dan turunnya kepercayaan.</p> <p>7. Tidak melakukan koordinasi sebelum memberikan pernyataan resmi</p> <p>Sering terjadi pernyataan berbeda antara satu pejabat dengan pejabat lainnya.</p> <p>Contoh kasus: Dalam kasus viral nasional, Kapolres menyatakan bahwa pelaku “masih buron”, sementara Humas Polda mengatakan “sudah diamankan.” Inkonsistensi ini memicu kebingungan publik dan membuka ruang spekulasi.</p>
--	--

	<p>Kesalahan etis: melanggar prinsip satu pintu informasi dan tidak mengikuti Perkap/Perpol tentang kehumasan. Implikasi: delegitimasi institusi, hilangnya kontrol narasi.</p> <p>8. Mengumbar detail kasus yang tidak boleh dipublikasikan</p> <p>Beberapa informasi tergolong sensitif dan tidak boleh diungkap demi menjaga proses penyidikan maupun perlindungan korban.</p> <p>Contoh kasus: Dalam kasus kekerasan seksual, pejabat malah mengumumkan identitas korban atau detail kronologi yang terlalu vulgar, sehingga mengundang kecaman dari lembaga perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>Kesalahan etis: pelanggaran privasi dan perlindungan korban. Implikasi: pemeriksaan etik, tuntutan hukum, dan kritik tajam media.</p> <p>Kesalahan etika komunikasi pada dasarnya adalah kesalahan kepemimpinan. Ia tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga menciderai profesionalisme institusi dan menurunkan legitimasi Polri di mata publik. Karena itu, perwira Sespimmen wajib memahami bahwa komunikasi publik adalah bagian dari operasi kepolisian—sebagai alat kendali situasi, pengelolaan persepsi, dan pembangunan kepercayaan.</p>
--	---

POKOK BAHASAN 2

KOMUNIKASI DIGITAL DAN MANAJEMEN *PUBLIC RELATION* BERBASIS MEDIA SOSIAL

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi, membentuk opini, dan memaknai peran institusi negara, termasuk Polri. Media sosial tidak lagi sekadar sarana hiburan atau ruang berbagi informasi, tetapi telah menjadi arena utama pembentukan persepsi publik, sumber informasi pertama dalam situasi krisis, dan ruang kompetisi narasi antara negara, masyarakat, serta berbagai aktor digital. Dalam konteks keamanan, media sosial bahkan menjadi *early warning system* sekaligus *risk amplifier*—dapat mempercepat deteksi dini, namun juga mampu memperuncing konflik hanya melalui satu unggahan yang viral dalam hitungan detik.

Bagi seorang perwira menengah Polri, kemampuan mengelola komunikasi digital bukan lagi keterampilan tambahan, tetapi kompetensi inti kepemimpinan modern. Publik saat ini menilai kinerja kepolisian bukan hanya dari tindakan di lapangan, tetapi juga dari cara Polri berkomunikasi, merespons isu, dan membangun kedekatan dengan masyarakat di ruang digital. Kecepatan, akurasi, empati, dan konsistensi pesan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik di era demokrasi digital.

Manajemen *Public Relation* berbasis media sosial bagi Polri memerlukan pendekatan strategis yang menggabungkan fungsi humas tradisional dengan karakteristik dunia digital: arus informasi yang cepat, sifat percakapan dua arah, kebutuhan transparansi tinggi, serta kemampuan merespons dinamika viral. Keberhasilan pengelolaan komunikasi digital tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar utama: *content management* (pengelolaan konten informatif, edukatif, dan humanis), *engagement management* (interaksi dua arah yang terukur dan terarah), serta *perception management* (pengendalian narasi dan respons terhadap isu publik).

Dalam operasional kewilayahan, media sosial juga menjadi alat penting untuk *early detection* kerawanan, pemantauan opini publik, mitigasi hoaks, serta publikasi keberhasilan tugas-tugas kepolisian yang berdampak langsung pada stabilitas keamanan wilayah. Ketika informasi negatif menyebar di ruang digital, respons Polri tidak hanya diuji secara substantif, tetapi juga diuji dari segi waktu. Dalam ekosistem media sosial, reputasi dapat rusak bukan karena kesalahan, tetapi karena keterlambatan merespons.

Materi ini disusun untuk membekali peserta Sespimmen dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis terkait komunikasi

digital dan manajemen *Public Relation* berbasis media sosial. Para perwira diharapkan mampu merancang strategi komunikasi digital yang efektif, mengelola krisis di ruang virtual, membangun citra institusi, serta memperkuat kepercayaan publik melalui pendekatan yang profesional, transparan, dan humanis. Di era di mana “narasi bersaing dengan fakta,” kemampuan komunikatif seorang *Middle leader* menjadi komponen strategis dalam menjaga legitimasi dan kehadiran negara di ruang digital.

A. Konsep dan Fungsi *Digital Public Relation* Polri

Digital Public Relation (Digital PR) Polri merupakan bentuk evolutif dari fungsi kehumasan kepolisian yang memanfaatkan teknologi informasi, platform media sosial, dan kanal komunikasi digital untuk membangun citra positif, mengelola hubungan dengan publik, serta menjaga stabilitas opini masyarakat. Dalam ekosistem digital yang bersifat cepat, interaktif, dan sering kali tidak terprediksi, Digital PR menjadi instrumen strategis bagi Polri untuk membangun kehadiran institusi yang responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika informasi.

Secara konseptual, Digital PR tidak sekadar memindahkan aktivitas humas tradisional ke platform digital, tetapi menghadirkan pendekatan baru yang berbasis pada partisipasi publik, dialog dua arah, dan manajemen narasi secara real time. Di era media sosial, Polri tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi pengelola percakapan publik. Hal ini mengharuskan perwira menengah memahami bahwa reputasi institusi tidak lagi dibangun secara satu arah, melainkan terbentuk melalui interaksi antara masyarakat, media, influencer, jurnalis warga, dan jejaring komunitas digital yang sangat aktif.

Digital PR Polri juga beroperasi dalam konteks transparansi publik, di mana setiap tindakan kepolisian dapat direkam, diunggah, dan dikomentari secara luas. Situasi ini membuat komunikasi digital tidak lagi bersifat pilihan, tetapi menjadi kewajiban operasional untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Dalam perspektif ini, Digital PR bekerja sebagai “penjaga persepsi institusi” yang memastikan setiap informasi tentang Polri disampaikan secara akurat, cepat, dan terkendali.

1. Fungsi Informasi dan Edukasi Publik

Fungsi pertama Digital PR adalah menyediakan informasi yang cepat, benar, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui media sosial seperti Instagram, X (Twitter), Facebook, TikTok, dan YouTube, Polri dapat menyampaikan berbagai informasi terkait layanan publik, situasi keamanan, lalu lintas, peringatan dini, dan klarifikasi

	<p>terhadap isu-isu viral. Fungsi edukasi publik juga berjalan melalui kampanye digital seperti anti-hoaks, tertib berlalu lintas, pencegahan kejahatan siber, hingga literasi hukum. Polri menjadi sumber rujukan yang kredibel di tengah banjir informasi.</p> <p>2. Fungsi Penguatan Citra dan Legitimasi Institusi</p> <p>Digital PR berfungsi memperkuat citra Polri sebagai institusi modern, humanis, dan transparan. Citra tidak dibangun melalui unggahan formal semata, tetapi juga melalui narasi visual seperti video kegiatan sosial, pelayanan publik yang humanis, dan tindakan cepat anggota dalam keadaan darurat. Citra positif ini menjadi modal legitimasi institusi yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik, terutama setelah adanya kasus-kasus yang berpotensi menurunkan reputasi.</p> <p>3. Fungsi Deteksi Dini dan Monitoring Opini Publik</p> <p>Media sosial adalah medan paling awal munculnya keluhan masyarakat, indikasi kerawanan keamanan, rumor, hingga potensi konflik. Digital PR Polri harus melakukan monitoring berkelanjutan untuk membaca pola percakapan publik (<i>public sentiment analysis</i>). Fungsi ini juga berperan sebagai early warning system untuk mengidentifikasi isu viral yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan maupun reputasi Polri, sehingga pimpinan dapat mengambil langkah taktis sebelum masalah berkembang.</p> <p>4. Fungsi Manajemen Krisis dan Pengendalian Narasi</p> <p>Dalam situasi krisis, Digital PR menjadi garda terdepan untuk merespons cepat dan mengendalikan aliran informasi. Kecepatan respons sangat menentukan apakah publik akan mempercayai narasi Polri atau narasi dari pihak lain. Pengelolaan krisis digital mencakup klarifikasi, penjelasan kronologis, rilis fakta hukum, dan penegasan langkah-langkah penanganan. Dalam konteks SCCT (Situational Crisis Communication Theory), Digital PR Polri harus mampu memilih strategi respons yang tepat: denial, diminish, atau rebuild.</p> <p>5. Fungsi Interaksi dan Kemitraan dengan Komunitas Digital</p> <p>Digital PR juga berperan dalam membangun hubungan baik dengan komunitas online: media, influencer, jurnalis warga, dan kelompok masyarakat sipil. Interaksi dua arah menciptakan kedekatan yang dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga keamanan. Komentar yang ditanggapi dengan baik, pesan yang dikemas humanis, dan</p>
--	--

	<p>dialog digital yang responsif meningkatkan persepsi bahwa Polri hadir dan mendengarkan masyarakat.</p> <p>6. Fungsi Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas</p> <p>Polri berkewajiban menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai UU 14/2008. Digital PR menjadi instrumen untuk menunjukkan transparansi proses penegakan hukum, akuntabilitas tindakan kepolisian, serta pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Transparansi ini berdampak langsung pada peningkatan legitimasi sosial dan kepercayaan publik.</p> <p>B. Prinsip Dasar <i>Digital Public Relation</i> Polri</p> <p>1. Prinsip pertama Digital PR Polri ialah transparansi dan akuntabilitas yang didukung oleh kecepatan sekaligus keakuratan informasi (<i>speed and accuracy</i>). Dalam ruang digital, delay beberapa menit saja dapat memberi ruang bagi rumor, hoaks, dan framing negatif yang sulit dikendalikan. Karena itu, Polri harus menjadi <i>first source of truth</i>—sumber kebenaran pertama—agar opini publik dapat diarahkan secara rasional dan tidak dikuasai pihak eksternal.</p> <p>Kecepatan tanpa keakuratan berbahaya; namun keakuratan tanpa kecepatan akan kehilangan momentum. Oleh sebab itu, Digital PR Polri berusaha memastikan bahwa setiap rilis resmi telah diverifikasi, ringkas, dan segera dipublikasikan melalui kanal digital institusi seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – akun X, Instagram, YouTube, TikTok, – website resmi Polri, – POLRI Super App. <p>Prinsip ini menjadi kritical terutama dalam penanganan isu viral, operasi kontinjensi, atau insiden yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik.</p> <p>2. Humanis, Empatik, dan Berorientasi Pelayanan Publik</p> <p>Perkembangan masyarakat digital membawa tuntutan baru: institusi penegak hukum harus hadir bukan hanya sebagai aparat yang tegas, tetapi juga humanis, empatik, dan komunikatif. Sentimen publik terbentuk bukan hanya dari isi pesan, tetapi dari nada, respons, bahasa tubuh digital, hingga cara Polri menanggapi komentar masyarakat.</p> <p>Digital PR Polri karena itu berlandaskan prinsip bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kedekatan psikologis. Unggahan yang menampilkan anggota Polri membantu masyarakat,</p>
--	--

	<p>kegiatan sosial, atau narasi human interest memiliki kekuatan besar dalam memperbaiki persepsi publik.</p> <p>3. Konsistensi Narasi di Seluruh Akun Resmi Polri</p> <p>Dalam ruang digital, ketidaksinkronan informasi antarsatker dapat membuka ruang spekulasi, merusak kepercayaan publik, dan menjadi amunisi bagi pihak yang ingin mendiskreditkan institusi. Oleh sebab itu, prinsip dasar Digital PR menekankan keseragaman narasi dan kesatuan informasi di seluruh akun resmi, baik tingkat Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek.</p> <p>Divisi Humas Polri (2023–2024) mengembangkan pedoman khusus sinkronisasi pesan berbasis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. satu data, b. satu narasi c. satu pintu klarifikasi, d. satu strategi media. <p>Ketidakkonsistenan narasi dalam kasus-nasional seperti tragedi Kanjuruhan (2022) dan kasus Irjen Ferdy Sambo (2022–2023) menjadi pembelajaran penting bahwa koordinasi komunikasi digital adalah bagian integral dari manajemen institusi.</p> <p>4. Penerapan PESO Model dalam Arsitektur Media Polri</p> <p>Secara operasional, Digital PR Polri mengadopsi PESO Model (Paid, Earned, Shared, Owned Media) yang dimodifikasi sesuai karakteristik penegakan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Owned Media</i>: akun resmi Divhumas Polri, akun Kapolri, dan seluruh akun satwil/satker. Ini adalah benteng pertama narasi resmi. b. <i>Shared Media</i>: konten yang dibagikan masyarakat atau komunitas digital. Harus dipantau karena memiliki potensi viral dinamis. Konten Polri harus mudah dibagikan, emosional positif, dan berorientasi edukasi. c. <i>Earned Media</i>: liputan wartawan, jurnalis warga, dan media mainstream. Untuk mendapatkannya, Polri harus menjalankan transparansi melalui konferensi pers digital, open data, dan penjelasan berbasis bukti. d. <i>Paid Media</i>: iklan layanan masyarakat atau kampanye digital yang diperlukan dalam situasi tertentu (misal kampanye anti-hoaks atau public safety instruction).
--	---

	<p>Model PESO membantu Polri membangun ekosistem informasi yang seimbang antara kredibilitas, jangkauan, serta penguatan legitimasi.</p> <p>5. Prinsip T-A-C-O: Transparansi – Akuntabilitas – Cepat – Open Data</p> <p>Dalam manajemen krisis digital, Polri mengadaptasi prinsip internasional <i>T-A-C-O (Tell Your Own Story, Act Fast, Communicate Internally First, Over-Communicate)</i>, lalu memodifikasinya menjadi: Transparansi – Akuntabilitas – Cepat – Open Data.</p> <p>Dengan prinsip ini, setiap isu viral harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> diklarifikasi dalam 1x24 jam, disertai bukti pendukung dipublikasikan secara menyeluruh ke semua kanal resmi, dilengkapi mekanisme tanya-jawab yang jelas. <p>Kasus besar seperti Kanjuruhan dan Ferdy Sambo menjadi contoh bahwa keterlambatan, ketidakkonsistenan, atau kurangnya transparansi dapat memperburuk krisis kepercayaan publik.</p> <p>6. Etika dan Kepatuhan Hukum dalam Ruang Digital</p> <p>Prinsip terakhir, sekaligus paling fundamental, adalah etika, kepatuhan hukum, dan integritas digital. Aktivitas Digital PR Polri harus sejalan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU ITE, Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Media Sosial Polri, Pedoman Perilaku Pengguna Media Sosial Polri (2022), Kode Etik Profesi Polri (KEPP). <p>Perwira Polri tidak boleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> mempublikasikan data pribadi tersangka/korban sebelum putusan inkrah, melakukan black campaign, provokasi, atau opini politik, menyebarkan konten sensitif tanpa izin, menggunakan akun pribadi untuk memengaruhi opini politik.
--	---

	<p>Sebaliknya, Polri diharapkan menjadi role model literasi digital melalui konten edukatif, anti-hoaks, dan narasi humanis sesuai misi Presisi: Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan.</p> <p>Dengan demikian, prinsip dasar Digital PR Polri bukan hanya perangkat komunikasi, tetapi instrumen strategis yang membentuk persepsi, legitimasi, dan hubungan antara Polri dan masyarakat. Dalam era masyarakat informasi, Digital PR menentukan apakah Polri dipersepsikan sebagai institusi yang modern, profesional, dan humanis—atau sebaliknya.</p> <p>C. Manajemen Konten Digital Institusional</p> <p>Manajemen Konten Digital Institusional dalam konteks Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya sebatas pengaturan teknis terhadap dokumen elektronik, melainkan merupakan tata kelola strategis informasi yang menentukan integritas, legitimasi, dan ketahanan institusi di tengah era digital yang sarat dengan tantangan siber, disinformasi, dan tuntutan transparansi publik. Sebagai lembaga penegak hukum yang bersifat hierarkis, teritorial, dan memiliki mandat konstitusional, Polri menghasilkan dan mengelola jutaan konten digital setiap hari—mulai dari dokumen intelijen, hasil penyelidikan, laporan operasional, arsip penegakan hukum, hingga konten publikasi humas dan rekaman kamera operasional. Setiap konten memiliki nilai strategis, risiko hukum, dan konsekuensi publik yang berbeda-beda sehingga memerlukan manajemen yang terstandar, aman, dan selaras dengan kerangka regulasi nasional.</p> <p>1. Definisi dan Lingkup Manajemen Konten Digital Polri</p> <p>Manajemen konten digital institusional merupakan proses sistematis untuk mencipta, mengumpulkan, mengorganisasi, menyimpan, mendistribusikan, mengarsipkan, dan menghapus konten digital resmi yang dimiliki Polri sepanjang siklus hidup konten atau <i>content lifecycle</i>. Lingkup konten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen operasional: surat perintah, laporan intelijen, laporan gangguan kamtibmas, SOP, RIK-Renops. Konten penegakan hukum: hasil penyelidikan, BAP digital, hasil forensik, CCTV, rekaman body-worn camera. Konten strategis Command Center: dashboard 112, rekaman drone, pantauan situasi. Konten publikasi humas: siaran pers, video edukasi, klarifikasi isu viral, konten PR digital.
--	---

	<p>e. Konten pelayanan publik: data SIM, SKCK, ETL, laporan Dumas Presisi.</p> <p>Tujuan utama manajemen konten adalah memastikan integritas (keaslian), akurasi (validitas), keamanan (confidentiality & compliance), dan aksesibilitas (availability) sesuai prinsip <i>data governance</i> dan <i>public accountability</i>.</p> <p>Kerangka ini selaras dengan berbagai regulasi seperti UU ITE No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024, UU KIP No. 14 Tahun 2008, UU PDP 2022, UU Kearsipan No. 43 Tahun 2009, serta Perkap No. 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan TI Polri.</p> <p>Dengan demikian, manajemen konten digital merupakan fungsi strategis yang berdampak langsung pada legitimasi, kinerja operasional, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri.</p> <p>2. Kerangka Teknis: Enterprise Content Management (ECM) dalam Lingkungan Polri</p> <p>Polri mengadopsi konsep Enterprise Content Management (ECM) sebagai standar global untuk mengelola konten institusional dalam lima pilar utama:</p> <p>a. <i>Capture</i> (Pemasukan Data)</p> <p>Mencakup proses pengumpulan konten dari berbagai sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen digital, 2) hasil investigasi, 3) CCTV, 4) bodycam, 5) laporan masyarakat melalui aplikasi, 6) unggahan humas, 7) arsip surat elektronik. <p>Teknik <i>optical character recognition</i> (OCR), metadata tagging, dan AI-based scanner digunakan untuk mengklasifikasi konten secara otomatis.</p> <p>b. <i>Manage</i> (Pengelolaan)</p> <p>Proses manajemen meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>workflow approval</i>, 2) version control,
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3) klasifikasi dokumen (terbuka, terbatas, rahasia, sangat rahasia sesuai PP No. 28 Tahun 2012), 4) penerapan struktur metadata, 5) mekanisme audit trail, 6) serta kontrol akses berbasis level kewenangan. <p>Aspek ini memastikan bahwa tidak ada konten yang bocor, disalahgunakan, atau dipublikasi tanpa persetujuan komando.</p> <p>c. <i>Store</i> (Penyimpanan Aman)</p> <p>Penyimpanan menggunakan model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>hybrid cloud</i> (kombinasi server pusat + cloud internal Polri), 2) <i>on-premise storage</i> untuk data rahasia negara, 3) enkripsi 256-bit untuk keamanan, 4) serta backup berkala untuk mencegah kehilangan. <p>d. <i>Preserve</i> (Pengarsipan Jangka Panjang)</p> <p>Arsip konten digital harus memenuhi standar UU 43/2009 tentang Kearsipan, termasuk retensi, digital preservation, dan migrasi format untuk mencegah <i>data decay</i>. Arsip bernilai sejarah atau hukum disimpan dalam <i>immutable storage</i> agar tidak dapat dimodifikasi.</p> <p>e. <i>Deliver</i> (Penyampaian atau Distribusi)</p> <p>Konten didistribusikan melalui mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rilis resmi Divhumas Polri, 2) website publik, 3) aplikasi internal, 4) rekomendasi penyidikan/penegakan hukum, 5) konferensi pers digital, 6) kanal Satwil. <p>Setiap penyampaian harus melalui <i>redaction process</i> untuk menyembunyikan informasi sensitif seperti identitas korban atau data pribadi.</p> <p>3. Tantangan Utama Manajemen Konten Digital Polri</p> <p>Beberapa tantangan strategis meliputi:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi informasi yang ketat (terbuka–terbatas–rahasia–sangat rahasia). b. Risiko kebocoran data pribadi yang diatur dalam UU PDP 2022. c. Serangan siber pada server, sistem cloud, atau perangkat anggota. d. Disinformasi dan manipulasi konten (deepfake, editing video), yang dapat memicu krisis kepercayaan publik. e. Fragmentasi sistem informasi, karena satker dan satwil menggunakan platform berbeda tanpa integrasi optimal. <p>Penanganan tantangan ini membutuhkan standar governance yang kuat, pelatihan SDM yang memadai, serta adopsi teknologi moderasi otomatis berbasis AI.</p> <p>4. Dimensi Strategis bagi Perwira Menengah Polri</p> <p>Bagi peserta Sespimmen, manajemen konten digital institusional harus dipahami sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Soft Power</i> Karena dapat membentuk persepsi publik melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) transparansi rilis fakta hukum, 2) konten humanis, 3) publikasi keberhasilan, 4) edukasi keamanan. <p>Transparansi yang tepat meningkatkan public trust dan legitimasi Polri sebagai institusi modern.</p> b. <i>Hard Power</i> Karena mengontrol informasi sensitif adalah bagian dari keamanan nasional. Pengendalian konten terkait: <ol style="list-style-type: none"> 1) operasi intelijen, 2) kasus strategis nasional, 3) data biometrik, 4) atau rekaman bodycam dalam insiden konflik, 5) dapat mencegah sabotase informasi dan perang narasi oleh aktor non-negara.
--	---

	<p>c. Perlawanan terhadap <i>Warfare Digital</i></p> <p>Di era <i>information warfare</i>, Polri harus siap menghadapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) serangan narasi (<i>negative campaigning</i>), 2) manipulasi opini, 3) propaganda digital, 4) operasi siber yang menarget legitimasi institusi. <p>Karena itu, manajemen konten bukan sekadar proses internal, tetapi instrumen pertahanan institusional.</p> <p>5. <i>Content Governance Framework</i> Polri</p> <p>Untuk memastikan tata kelola berjalan efektif, Polri membutuhkan kerangka kebijakan konten yang mencakup tiga lapis:</p> <p>a. Regulasi dan Pedoman</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan Konten Digital Polri (<i>institutional policy</i>), 2) SOP pengelolaan dan klasifikasi konten, 3) Pedoman pengamanan konten rahasia, 4) kode etik penggunaan media digital oleh anggota. <p>b. Organisasi dan Struktur</p> <p>Pembentukan unit resmi seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Pengelola Konten Digital, 2) Biro Multimedia, 3) Pusiknas, 4) admin terlatih di tiap satker/satwil. <p>Unit ini bertanggung jawab atas verifikasi, moderasi, dan publikasi konten institusional.</p> <p>c. Teknologi dan Keamanan</p> <p>Implementasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Data Loss Prevention (DLP)</i>, 2) <i>AI-based content moderation</i>, 3) integrasi DAM–RMS–SIMKARI, 4) manajemen akses berbasis <i>Zero Trust Architecture</i>.
--	---

	<p>Sistem audit dan auto-log wajib dipasang untuk mencegah sabotase internal dan kebocoran.</p> <p>Dengan perkembangan teknologi, konten digital institusi Polri telah menjadi aset strategis sekaligus kerentanan strategis. Pengelolaannya bukan hanya fungsi teknis, tetapi bagian integral dari kepemimpinan modern yang menentukan efektivitas operasi, legitimasi publik, serta ketahanan Polri dalam menghadapi perang informasi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0</p> <p>D. Pengendalian Narasi Digital dan Deteksi Dini Opini Publik</p> <p>Pengendalian narasi digital merupakan bagian kritical dalam strategi keamanan modern yang menempatkan ruang siber sebagai domain operasi baru bagi kepolisian. Dalam era konvergensi media, ketika batas antara dunia nyata dan digital menjadi kabur, sebuah unggahan dapat memicu ketegangan sosial, mempolarisasi masyarakat, atau bahkan menggerakkan massa dalam waktu sangat singkat. Polri sebagai institusi penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa narasi publik di ruang digital tidak berkembang liar, tidak dimanipulasi aktor tertentu, dan tidak mengarah pada ancaman kamtibmas.</p> <p>1. Pengendalian Narasi Digital sebagai Strategi Keamanan Nasional</p> <p>Di era informasi, narasi adalah kekuatan. Pengendalian narasi bukan berarti membatasi kebebasan berpendapat, tetapi memastikan bahwa opini publik tidak dipengaruhi misinformasi, disinformasi, dan propaganda yang dapat menimbulkan ancaman keamanan. Kasus hoaks Pemilu 2019 dan kerusuhan 22 Mei 2019 menunjukkan bahwa viralitas konten dapat menggerakkan emosi kolektif dan menciptakan efek domino berupa aksi massa.</p> <p>Untuk menghadapi dinamika tersebut, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Pusiknas, dan unit Virtual Police menerapkan konsep narrative shaping yang dibangun atas tiga pilar:</p> <p>a. <i>Presence</i> (Kehadiran Resmi Polri)</p> <p>Polri harus hadir secara aktif, terbuka, dan kredibel di platform digital agar masyarakat memiliki sumber informasi utama yang dapat dipercaya. Akun resmi Polda/Polres, Divhumas Polri, serta kehadiran personal pimpinan (Kapolri, Kapolda, Kapolres) memainkan peran penting membangun rasa aman</p>
--	--

	<p>digital (<i>digital sense of security</i>). Tanpa kehadiran resmi, ruang digital akan dikuasai oleh narasi spekulatif.</p> <p>b. <i>Engagement</i> (Interaksi Aktif dan Humanis)</p> <p>Interaksi langsung dengan netizen digunakan untuk meredakan emosi, meluruskan kesalahpahaman, dan memperbaiki persepsi publik. Komentar responsif, klarifikasi cepat, dan permintaan maaf institusional (jika diperlukan) terbukti efektif menurunkan tensi sosial. Model ini diadopsi dari strategi kepolisian modern seperti Singapore Police Force dan Japan National Police Agency yang mengutamakan pendekatan humanis berbasis komunikasi dua arah.</p> <p>c. <i>Counter-Narrative</i> (Narasi Pembanding yang Kredibel)</p> <p><i>Counter-narrative</i> dilakukan untuk menahan laju narasi negatif sebelum menjadi dominan. Strategi ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyajian data & fakta hukum, 2) video penjelasan singkat, 3) infografis visual, 4) wawancara pimpinan, 5) pemanfaatan influencer atau <i>community gatekeepers</i>. <p>Pendekatan ini sejalan dengan doktrin Strategic Communication NATO (2022) yang menekankan bahwa narasi yang benar harus hadir lebih cepat dan lebih kuat dibanding narasi yang salah.</p> <p>2. Deteksi Dini Opini Publik Berbasis Big Data dan AI</p> <p>Pengendalian narasi yang efektif hanya bisa tercapai jika Polri mampu mendeteksi potensi isu sejak dini. Untuk itu, Polri menerapkan sistem pemantauan opini publik berbasis big data analytics dan artificial intelligence (AI).</p> <p>Beberapa platform yang digunakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Cyber Drone 9</i>—Pusiknas Bareskrim, b. Sektor Siber Polda, c. Kolaborasi dengan <i>Locqsa Intelligence</i>, <i>MediaWave</i>, dan sejumlah vendor intelijen digital. <p>Metode pemantauan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>keyword-based monitoring</i> (frasa sensitif),
--	--

	<p>b. <i>sentiment analysis</i>,</p> <p>c. <i>geolocation tagging</i>,</p> <p>d. <i>hashtag tracking</i>,</p> <p>e. <i>network & influencer mapping</i> untuk mengidentifikasi aktor penyebar,</p> <p>f. <i>predictive analytics</i> untuk memprediksi kapan isu menjadi trending.</p> <p>Penelitian Lemhannas RI (2024) menunjukkan bahwa respons cepat dalam golden hour 0–3 jam dapat menurunkan potensi eskalasi konflik sosial hingga 85%—data yang menegaskan bahwa deteksi dini bukan pelengkap, tetapi syarat keberhasilan operasi pengendalian narasi.</p> <p>3. <i>Virtual Police 2.0</i> dan Pendekatan Klarifikasi Humanis</p> <p>Konsep <i>Virtual Police</i> yang selama ini dikenal sebagai pemberi peringatan (warning) terhadap potensi pelanggaran UU ITE telah berkembang menjadi <i>Virtual Police 2.0</i>, yaitu sistem klarifikasi proaktif melalui:</p> <p>a. video penjelasan singkat dari pejabat kewilayahan,</p> <p>b. live streaming klarifikasi Kapolda/Kapolres,</p> <p>c. infografis edukatif,</p> <p>d. konten “Myth vs Fact”,</p> <p>e. <i>dialog digital</i> yang humanis dan tidak represif.</p> <p>Pendekatan ini meminimalisir tindakan represif sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga ruang siber menjadi lebih aman dan terkelola.</p> <p>4. Koordinasi Lintas Sektor dan Penguatan SDM Siber Polri</p> <p>Keberhasilan pengendalian narasi digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Polri telah bermitra dengan:</p> <p>a. Kominfo dalam penanganan konten negatif,</p> <p>b. BSSN dalam keamanan siber,</p> <p>c. Lemhannas RI dalam kajian strategis,</p> <p>d. UI, ITB, STIN, BINUS dalam cyber psychology dan analitik big data.</p> <p>Di tingkat pelatihan, Polri mengembangkan program “Digital Leadership for Law Enforcement” yang melatih perwira dalam komunikasi digital, analisis wacana kritis, moderasi konten, serta pemetaan ancaman narasi.</p>
--	---

	<p>Pendekatan ini selaras dengan model evidence-based policing, di mana kebijakan dan respons didasarkan pada data, statistik, dan analisis risiko melalui indikator seperti:</p> <ol style="list-style-type: none">a. <i>Social Media Conflict Index (SMCI)</i>,b. <i>viral risk score</i>,c. analisis wacana kritis (<i>critical discourse analysis</i>). <p>Hal ini menjadikan fungsi intelijen siber Polri semakin bersifat <i>predictive-preventive</i>, bukan reaktif.</p> <p>5. Transformasi Menuju <i>Predictive-Preventive Cyber Policing</i></p> <p>Seluruh pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian narasi digital bukan sekadar fungsi humas, tetapi merupakan bentuk <i>cyber policing</i> modern yang mengintegrasikan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. teknologi big data,b. psikologi massa digital,c. strategi komunikasi,d. penegakan hukum siber,e. dan intelijen digital. <p>Dengan menerapkan pengendalian narasi yang terukur dan deteksi dini berbasis data, Polri tidak hanya merespons isu, tetapi mengantisipasi ancaman sejak fase embrio, selaras dengan arah Predictive-Preventive Policing dalam Perkap No. 6 Tahun 2023.</p>
--	--

POKOK BAHASAN 3

PENANGANAN MEDIA SAAT KRISIS (*CRISIS MEDIA HANDLING*)

Dalam era komunikasi digital yang serba cepat dan berisiko tinggi, penanganan media saat krisis (*Crisis Media Handling*) menjadi salah satu kompetensi strategis yang harus dikuasai oleh setiap perwira menengah Polri. Krisis—baik berupa insiden keamanan, dugaan pelanggaran anggota, isu viral, kecelakaan, konflik sosial, maupun kasus yang menjadi perhatian publik—tidak hanya menuntut respons operasional yang cepat dan tepat, tetapi juga memerlukan strategi komunikasi publik yang terukur agar informasi yang berkembang tetap akurat, terkendali, dan tidak menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman.

Dalam konteks Polri, krisis adalah momentum yang dapat memperkuat legitimasi atau sebaliknya menghancurkan kepercayaan publik. Media—baik media arus utama maupun media sosial—akan menjadikan setiap pernyataan, sikap, dan keputusan Polri sebagai bahan pemberitaan yang dapat memengaruhi persepsi jutaan masyarakat dalam hitungan menit. Karena itu, kemampuan mengelola media bukan lagi pilihan, tetapi keharusan operasional yang melekat pada tugas kepemimpinan kewilayahan.

Crisis Media Handling menuntut kesiapan, ketenangan, dan keahlian komunikasi yang matang. Perwira Polri harus mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap data sensitif; antara kecepatan memberikan klarifikasi dan kehati-hatian hukum; serta antara kebutuhan menjaga citra institusi dan kewajiban memenuhi hak publik atas informasi. Strategi penanganan media saat krisis melibatkan koordinasi lintas fungsi, penyusunan pesan inti (*key message*), respons dalam *golden hour*, penggunaan juru bicara tunggal, dan kemampuan menghadapi pertanyaan tajam dari media tanpa bersifat defensif.

Dalam krisis, narasi siapa yang paling cepat, paling akurat, dan paling dipercaya akan menjadi narasi dominan. Oleh sebab itu, perwira Sespimmen perlu memahami bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap operasi kepolisian, tetapi bagian integral dari penanganan krisis itu sendiri. *Crisis Media Handling* adalah instrumen kepemimpinan strategis yang menentukan apakah Polri akan tampil sebagai institusi yang profesional dan bertanggung jawab, atau sebaliknya menjadi korban dari misinformasi, hoaks, dan framing negatif.

Materi ini akan membahas prinsip, strategi, serta teknik praktis penanganan media saat krisis, sekaligus memberikan landasan

konseptual agar para perwira mampu mengimplementasikannya dalam situasi nyata di lapangan. Dengan penguasaan kompetensi ini, para pemimpin Polri di tingkat menengah diharapkan mampu menjaga kredibilitas institusi, meredam eskalasi isu, dan mengarahkan opini publik secara efektif pada setiap fase krisis.

A. Konsep dan Fungsi Komunikasi Krisis

Komunikasi krisis merupakan proses strategis penyampaian informasi, pengelolaan persepsi, dan pengendalian narasi pada situasi yang mengancam stabilitas organisasi, merusak kepercayaan publik, atau berpotensi menimbulkan eskalasi sosial. Dalam konteks Kepolisian Negara Republik Indonesia, komunikasi krisis tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan fakta, namun juga menjadi instrumen kepemimpinan untuk menjaga legitimasi institusi, menenangkan publik, serta mencegah meluasnya dampak krisis terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Secara konseptual, komunikasi krisis berakar pada teori *Crisis Communication* (Coombs, 2015; Fearn-Banks, 2016) yang menekankan bahwa pada saat krisis, organisasi harus melakukan tindakan komunikasi yang cepat, akurat, empatik, dan konsisten. Polri menghadapi spektrum krisis yang luas—mulai dari kejadian gangguan kamtibmas, kecelakaan besar, bencana alam, pelanggaran etik anggota, hingga isu viral yang berkembang di media sosial. Karena itu, komunikasi krisis bagi Polri tidak hanya bersifat reaktif, tetapi harus mencerminkan pendekatan prediktif dan preventif untuk menjaga stabilitas kamtibmas dan kepercayaan publik.

Komunikasi krisis pada intinya harus mampu menjawab tiga kebutuhan mendasar publik: (1) informasi yang benar, (2) kepastian tindakan, dan (3) rasa aman. Ketika ketiga unsur ini terpenuhi, tingkat kepanikan menurun, opini publik dapat diarahkan secara positif, dan kepercayaan masyarakat kepada institusi tetap terjaga.

1. Fungsi Informasi: Memberikan Kejelasan dan Mengurangi Ketidakpastian

Fungsi paling dasar dari komunikasi krisis adalah menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan terverifikasi. Dalam konteks Polri, informasi yang tepat waktu sangat menentukan apakah publik akan mempercayai narasi resmi atau justru narasi alternatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketika krisis terjadi, publik biasanya mengalami ketidakpastian dan kecemasan; karena itu, informasi yang jelas menjadi alat paling efektif

	<p>untuk mengurangi spekulasi serta mencegah berkembangnya hoaks dan disinformasi.</p> <p>Polri perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. benar-benar terverifikasi secara hukum dan operasional, b. tidak membuka data sensitif yang dapat mengganggu penyidikan, c. bersifat konsisten antar level (Mabes–Polda–Polres), d. disampaikan melalui juru bicara resmi untuk mencegah distorsi. <p>2. Fungsi Manajemen Persepsi: Mengendalikan Narasi dan Mencegah Eskalasi</p> <p>Krisis bukan hanya persoalan faktual, tetapi juga persoalan persepsi. Dalam banyak kasus, dampak krisis lebih besar disebabkan oleh kesalahan persepsi daripada kejadian awal itu sendiri. Oleh karena itu, komunikasi krisis Polri harus mampu mengendalikan narasi dan menjaga framing publik.</p> <p>Melalui strategi seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>key message development</i> (tiga pesan inti), b. <i>risk framing</i> yang tepat, c. <i>rumor control</i>, d. <i>counter-narrative</i> terhadap hoaks, <p>Polri dapat mengarahkan pemahaman publik terhadap fakta secara proporsional.</p> <p>Fungsi ini sangat penting karena opini publik yang tidak terkendali dapat memicu ketegangan emosional, memengaruhi mobilisasi massa, dan memperburuk situasi keamanan.</p> <p>3. Fungsi Koordinasi Internal: Menyatukan Arah Operasi dan Informasi</p> <p>Komunikasi krisis bukan hanya ditujukan keluar (eksternal), tetapi juga ke dalam (internal). Dalam situasi darurat, semua satuan Polri harus memahami peran, tugas, dan batasan mereka. Keterlambatan informasi internal atau ketidakkonsistenan pernyataan antar-satker dapat memperburuk situasi, menimbulkan kebingungan, dan mengganggu efektivitas penanganan krisis.</p> <p>Karena itu, fungsi koordinasi komunikasi meliputi:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> a. penyampaian instruksi pimpinan secara cepat dan jelas, b. keseragaman narasi di seluruh lini, c. pembatasan pihak yang berwenang memberikan pernyataan, d. penggunaan SOP komunikasi krisis dan rantai komando yang baku. <p>4. Fungsi Pemulihan Reputasi Institusi</p> <p>Krisis selalu membawa risiko reputasi. Bahkan ketika Polri telah bekerja profesional, opini publik dapat berbelok karena framing media, propaganda digital, atau kesalahpahaman. Dengan komunikasi krisis yang tepat, Polri dapat memulihkan kepercayaan publik, memperbaiki citra, dan menunjukkan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas.</p> <p>Fungsi pemulihan reputasi dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konferensi pers yang terbuka dan informatif, b. permintaan maaf institusional bila diperlukan, c. penjelasan mengenai langkah korektif, d. publikasi keberhasilan pasca-krisis. <p>Pendekatan ini menunjukkan bahwa Polri bukan hanya responsif terhadap masalah, tetapi juga belajar dari setiap krisis untuk memperbaiki diri.</p> <p>5. Fungsi Membangun Rasa Aman dan Stabilitas Sosial</p> <p>Pada hakikatnya, komunikasi krisis Polri berfungsi menciptakan ketenangan sosial. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara hadir, memahami situasi, dan mengambil langkah yang tepat. Dengan komunikasi yang empatik, tegas, dan transparan, Polri dapat mengurangi kepanikan, meredam emosi kolektif, serta mencegah aksi-aksi destruktif yang dipicu ketidakpastian informasi.</p> <p>Dengan demikian, komunikasi krisis bukan sekadar aktivitas penyampaian informasi, tetapi merupakan instrumen strategis kepemimpinan Polri dalam menjaga legitimasi, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik. Bagi perwira menengah yang memimpin satuan kewilayahan, memahami konsep dan fungsi komunikasi krisis adalah kemampuan kunci dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks dan cepat berubah.</p>
--	---

B. Prinsip Komunikasi Krisis

Prinsip komunikasi krisis merupakan rangkaian pendekatan strategis yang dirancang untuk melindungi reputasi organisasi, menjaga kepercayaan publik, dan meminimalkan dampak negatif pada saat terjadi krisis. Dalam lingkungan kepolisian, komunikasi krisis tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian narasi publik, penenangan masyarakat, dan perlindungan legitimasi institusi. Polri sebagai aktor keamanan negara sering berhadapan dengan krisis multidimensi—mulai dari insiden operasional, bencana, isu viral, hingga pelanggaran etik anggota—sehingga penguasaan prinsip-prinsip komunikasi krisis menjadi kebutuhan strategis bagi seorang perwira menengah.

1. Tiga Pilar Utama Komunikasi Krisis Menurut Coombs (2019)

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Coombs (2019) menyatakan bahwa komunikasi krisis yang efektif harus berdiri di atas kecepatan, keakuratan, dan konsistensi.

a. Kecepatan (*Be Fast*)

Krisis menimbulkan kekosongan informasi. Ketika institusi terlambat merespons, ruang tersebut akan segera diisi oleh rumor, hoaks, dan spekulasi, terutama di media sosial. Bagi Polri, kecepatan berarti memberikan *verified preliminary statement* dalam 1–3 jam pertama atau *golden hour* untuk meredam eskalasi persepsi publik. Prinsip “tell your own story first” menjadi penting untuk memastikan bahwa narasi awal berasal dari Polri, bukan pihak luar.

b. Keakuratan (*Be Accurate*)

Kecepatan tidak boleh mengorbankan kebenaran. Informasi krisis harus diverifikasi secara cepat namun ketat, sesuai dengan prinsip legalitas dan asas praduga tak bersalah. Pernyataan yang salah atau terburu-buru dapat menghasilkan krisis sekunder yang lebih besar, seperti yang sering terjadi pada kasus viral ketika klarifikasi awal justru dikoreksi di kemudian hari.

c. Konsistensi (*Be Consistent*)

Satu fakta—satu pesan—satu suara. Semua lini organisasi (Divhumas, Propam, Reskrim, dan kewilayahan) harus menyampaikan narasi yang sama. Dalam konteks Polri, prinsip one voice policy menjadi sangat vital untuk mencegah kebingungan publik dan

	<p>menghindari celah yang dapat dimanfaatkan pihak yang ingin mendiskreditkan institusi.</p> <p>2. Prinsip Etis dan Operasional Menurut Ulmer, Sellnow & Seeger (2019)</p> <p>Selain tiga pilar dasar, literatur komunikasi krisis menambahkan empat prinsip etis yang sangat relevan untuk kepolisian.</p> <p>a. Transparansi yang Bertanggung Jawab (<i>Openness with Accountability</i>)</p> <p>Transparansi bukan membuka semua data, tetapi memberikan informasi yang cukup, jelas, dan mudah dipahami mengenai apa yang terjadi serta tindakan apa yang sedang dilakukan Polri. Transparansi mencegah rumor dan membangun kepercayaan. Contoh kegagalan transparansi terlihat dalam fase awal Tragedi Kanjuruhan (2022), ketika publik menilai informasi Polri tidak segera lengkap dan jelas.</p> <p>b. Empati dan Kepedulian (<i>Concern and Empathy</i>)</p> <p>Publik tidak hanya menilai fakta, tetapi juga menilai emosi dan kepedulian pimpinan Polri. Pernyataan yang kering, defensif, atau terlalu birokratis akan memperburuk persepsi publik. Empati harus ditunjukkan sejak awal, terutama jika krisis melibatkan korban jiwa atau kerugian masyarakat.</p> <p>c. Responsivitas (<i>Responsiveness</i>)</p> <p>Krisis menuntut kehadiran institusi secara terus-menerus. Responsivitas berarti menjawab pertanyaan publik, menyediakan <i>update</i> berkala, dan menunjukkan bahwa Polri hadir serta bekerja. Keheningan panjang dianggap sebagai sikap menutup diri.</p> <p>d. Pembelajaran Pasca-Krisis (<i>Learning Orientation</i>)</p> <p>Krisis harus menjadi momentum pembelajaran institusional. Polri perlu menunjukkan langkah korektif, evaluasi SOP, dan peningkatan profesionalisme. Pendekatan ini membantu memulihkan reputasi sekaligus meningkatkan kredibilitas jangka panjang.</p> <p>3. Prinsip Koordinasi dan Penggunaan Juru Bicara</p> <p>Penelitian Reynolds & Seeger (2005) serta Kovoov-Misra & Nathan (2020) menegaskan bahwa krisis yang tidak dikelola secara terpusat akan melahirkan pesan yang kontradiktif. Polri telah mengadopsi prinsip ini dalam Peraturan Kapolri</p>
--	---

	<p>No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Publik, yang menempatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kadiv Humas Polri sebagai koordinator komunikasi krisis, b. Juru bicara resmi sebagai penyampai tunggal pembaruan informasi, c. serta mewajibkan satker-satwil untuk tidak mengeluarkan pernyataan sebelum arahan pusat keluar. <p>Prinsip “one gate, one voice” terbukti efektif, seperti pada penanganan terorisme Poso serta operasi anti-teror pasca Bom Bali I dan II. Konsistensi narasi membuat pemberitaan media lebih terarah dan meminimalisir spekulasi publik.</p> <p>4. Relevansi bagi Perwira Sespimmen Polri</p> <p>Bagi peserta didik Sespimmen, prinsip komunikasi krisis bukan sekadar teori, tetapi keahlian kepemimpinan yang harus dikuasai untuk menjaga legitimasi institusi. Seorang perwira menengah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aktor pengambil keputusan, b. penyedia informasi awal kepada publik, c. pengendali narasi kewilayahan, d. penjamin stabilitas sosial lokal. <p>Kegagalan menerapkan prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan <i>reputational damage</i>, hilangnya legitimasi publik, gangguan kamtibmas, hingga tekanan politik terhadap institusi. Sebaliknya, jika diterapkan secara tepat, komunikasi krisis dapat mengubah krisis menjadi peluang untuk memperkuat profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.</p> <p>C. Teknik Berinteraksi dengan Wartawan dan Media Broadcast Saat Krisis</p> <p>Dalam konteks krisis, seperti demonstrasi besar-besaran atau insiden kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian, interaksi dengan wartawan dan media broadcast menjadi elemen krusial dalam strategi komunikasi Polri. Teknik utama meliputi pendekatan transparansi dan empati, di mana pejabat Polri harus segera membentuk Joint Information Center (JIC) virtual atau fisik untuk menyinkronkan pesan dengan mitra seperti pemerintah daerah dan lembaga darurat lainnya, sehingga menghindari inkonsistensi yang dapat memperburuk persepsi publik. Misalnya, saat menghadapi wartawan, prioritaskan "stealing thunder"</p>
--	--

	<p>dengan mengungkap fakta kritis secara proaktif melalui konferensi pers terjadwal, daripada membiarkan rumor menyebar melalui media sosial, yang dapat mengurangi kredibilitas hingga 40% menurut studi terbaru. Untuk media broadcast, gunakan bahasa sederhana dan visual seperti infografis untuk menjelaskan kronologi kejadian, sambil mendorong dialog dua arah melalui sesi Q&A langsung, yang tidak hanya membangun kepercayaan tetapi juga memungkinkan klarifikasi real-time. Bagi peserta didik Sespimmen Polri, pemahaman ini esensial karena krisis sering kali melibatkan polarisasi publik, di mana interaksi yang efektif dapat mencegah eskalasi seperti yang terlihat pada demo Agustus 2025, di mana kurangnya koordinasi awal menyebabkan tuduhan represif dari media asing. Selain itu, latih diri untuk tetap tenang di bawah tekanan, hindari jargon teknis polisi yang sering disalahpahami, dan selalu hubungkan narasi dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat legitimasi institusi, sebagaimana direkomendasikan dalam pedoman komunikasi krisis pemerintah Indonesia yang menekankan respons berbasis empati.</p> <p>Lebih mendalam, teknik interaksi ini harus didukung oleh persiapan pra-krisis, termasuk membangun jaringan dengan jurnalis melalui pelatihan rutin dan simulasi, yang memastikan alur informasi tetap lancar saat situasi darurat. Dalam era digital 2025, integrasikan media broadcast dengan platform sosial seperti X (Twitter) untuk amplifikasi pesan, di mana Polri dapat memantau sentimen publik secara real-time dan merespons rumor dalam hitungan menit, sebagaimana strategi yang berhasil diterapkan oleh departemen kepolisian AS dalam manhunt Boston Marathon 2013, yang diadaptasi untuk konteks Indonesia melalui webinar BCM Institute 2024. Hindari kesalahan umum seperti penyangkalan berlebih (denial strategy), yang justru menimbulkan distrust, dan ganti dengan pengakuan parsial disertai bukti seperti footage CCTV, yang terbukti meningkatkan kepercayaan publik hingga 25% berdasarkan analisis kasus Brigadir J. Untuk peserta Sespimmen, fokus pada pelatihan ini berarti mengasah keterampilan negosiasi media, seperti menyiapkan spokesperson tunggal untuk menghindari multi-suara yang membingungkan, serta memanfaatkan data analitik untuk menargetkan broadcast lokal di daerah rawan krisis seperti Jakarta atau Makassar. Penting juga untuk mempertimbangkan aspek etis, di mana interaksi harus humanis sesuai prinsip BETAH Polri, memastikan bahwa setiap pernyataan tidak hanya informatif tapi juga mendukung pemulihan korban, sehingga mengubah krisis menjadi peluang restorasi citra institusi.</p> <p>Akhirnya, evaluasi pasca-krisis menjadi teknik penutup yang mendalam, di mana Polri harus mereview interaksi media melalui</p>
--	--

metrik seperti retweet positif dan survei kepercayaan publik, untuk menyempurnakan strategi di masa depan. Di tengah tantangan 2025 seperti disinformasi digital dan tuntutan transparansi global, peserta Sespimmen Polri diharapkan mengadopsi model SCCT (Situational Crisis Communication Theory) yang fleksibel, menyesuaikan respons berdasarkan tingkat atribusi tanggung jawab, seperti pada kasus Arya Daru di mana bahasa teknis polisi gagal menjawab kekhawatiran keluarga dan media. Integrasikan teknologi seperti AI untuk monitoring berita, dan kolaborasi dengan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk memastikan konten broadcast tetap obyektif, sehingga interaksi bukan hanya reaktif tapi prediktif. Bagi calon pemimpin menengah Polri, penguasaan teknik ini bukan sekadar keterampilan, melainkan mandat untuk menjaga stabilitas nasional, di mana keberhasilan komunikasi krisis dapat mencegah polarisasi lebih lanjut dan memperkuat sinergi TNI-Polri

D. Taktis Stabilisasi Reputasi pada Krisis Tingkat Wilayah

Dalam konteks manajemen krisis tingkat wilayah, taktikal stabilisasi reputasi merujuk pada serangkaian langkah operasional yang dirancang untuk menjaga atau memulihkan citra institusi Polri di tengah gangguan stabilitas regional, seperti kerusuhan sosial, bencana alam, atau konflik politik yang melibatkan elemen masyarakat luas. Krisis tingkat wilayah biasanya mencakup skala provinsi atau kabupaten, di mana dampaknya tidak hanya terbatas pada keamanan fisik tetapi juga erosi kepercayaan publik terhadap Polri sebagai penjaga stabilitas nasional. Menurut prinsip kepemimpinan taktis yang diajarkan di Sespimmen Polri, stabilisasi ini dimulai dengan asesmen cepat (rapid assessment) untuk mengidentifikasi akar krisis, seperti misinformasi di media sosial atau respons lambat aparat, diikuti oleh strategi pre-emptive seperti peningkatan komunikasi transparan melalui Divisi Humas. Pendekatan ini terintegrasi dengan Grand Strategy Polri 2025-2045, yang menekankan modernisasi operasional untuk mencegah eskalasi krisis menjadi nasional, dengan fokus pada kolaborasi antar-stakeholder seperti pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Di tingkat taktis, stabilisasi melibatkan penggunaan tim respons cepat (quick response team) untuk mendistribusikan narasi positif, seperti laporan kemajuan penanganan krisis, guna membangun persepsi bahwa Polri proaktif dan akuntabel.

Pada fase implementasi, taktikal stabilisasi reputasi menyoroti penggunaan komunikasi krisis berbasis data, di mana Polri memanfaatkan platform digital untuk melawan hoaks dan disinformasi yang sering memperburuk persepsi negatif di wilayah krisis. Misalnya, dalam kasus demonstrasi besar seperti yang terjadi pada Agustus 2025 di Jakarta dan daerah sekitarnya,

strategi mencakup pembentukan pusat informasi terpadu (information hub) yang melibatkan Intelegen Keamanan Polri untuk memetakan narasi publik secara real-time, diikuti oleh rilis pernyataan resmi yang menekankan komitmen terhadap hak asasi manusia (HAM) dan restoratif justice. Pendekatan ini selaras dengan teori komunikasi krisis ala Situational Crisis Communication Theory (SCCT), yang membedakan antara krisis yang dapat diatasi (preventable) dan tidak terhindarkan (accidental), di mana Polri diarahkan untuk menggunakan taktik bolstering—memperkuat pencapaian positif seperti penyelamatan korban—sambil menghindari denial yang bisa memperburuk citra. Di Sespimmen, materi ini ditekankan melalui simulasi skenario wilayah, seperti penanganan intoleransi atau radikalisme, di mana peserta didik dilatih untuk mengintegrasikan manajemen risiko reputasi dengan operasi lapangan, termasuk koordinasi dengan BNPB untuk bencana, guna memastikan respons yang holistik dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan masyarakat lokal. Terbaru, pada 2025, Polri telah mengadopsi smart policing dengan AI untuk monitoring sentimen publik, yang terbukti efektif dalam meredam eskalasi selama protes ekonomi.

Secara mendalam, evaluasi pasca-krisis menjadi elemen krusial dalam taktikal stabilisasi, di mana Polri melakukan audit internal untuk mengukur dampak reputasi melalui indikator seperti Indeks Persepsi Korupsi (CPI) atau survei kepercayaan publik dari lembaga seperti Indikator Politik Indonesia. Di tingkat wilayah, ini melibatkan debriefing lintas-unit untuk mengidentifikasi kelemahan, seperti kekerasan aparat yang tercatat 602 insiden pada Juli 2024-Juni 2025, dan merumuskan rekomendasi reformasi, termasuk pelatihan etika kepolisian berbasis HAM. Bagi peserta didik Sespimmen Polri, pemahaman ini esensial untuk membentuk pemimpin taktis yang transformasional, yang mampu mengubah krisis menjadi peluang pembangunan citra jangka panjang melalui kemitraan masyarakat (community policing). Sumber terbaru seperti Renstra Polri 2025-2029 menekankan integrasi teknologi digital untuk transparansi, sementara laporan KontraS 2025 menyoroti perlunya akuntabilitas untuk mencegah krisis berulang. Dengan demikian, stabilisasi reputasi bukan hanya reaktif, melainkan proaktif, mendukung visi Indonesia Emas 2045 di mana Polri menjadi institusi yang dipercaya sepenuhnya.

POKOK BAHASAN 4

PUBLIC SPEAKING, DIGITAL PUBLIC RELATION, DAN MANAJEMEN MEDIA DALAM OPERASI KEPOLISIAN

Dalam era keamanan modern yang ditandai oleh kecepatan informasi, keterbukaan publik, dan dominasi media digital, peran komunikasi menjadi salah satu elemen paling strategis dalam keberhasilan operasi kepolisian. *Public Speaking, Digital Public Relations* (Digital PR), dan manajemen media bukan lagi sekadar keterampilan pendukung, tetapi telah menjadi kompetensi inti kepemimpinan yang menentukan efektivitas operasi, pengendalian situasi, dan legitimasi institusi di mata masyarakat.

Bagi seorang perwira menengah Polri, kemampuan berbicara di depan publik secara meyakinkan, mengelola narasi digital, dan berinteraksi secara taktis dengan media massa merupakan bagian dari tugas kewilayahan yang melekat. Di lapangan, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari aspek teknis dan taktis, tetapi juga dari kemampuan pimpinan wilayah dalam menjelaskan situasi kepada publik, meredam keresahan, membangun kepercayaan, serta memastikan bahwa informasi yang beredar terkendali dan akurat. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi alat kepemimpinan, bukan hanya proses penyampaian pesan.

Media—baik media arus utama maupun media sosial—bekerja sebagai pengganda persepsi (*perception amplifier*). Kesalahan kecil dalam penyampaian informasi dapat memunculkan krisis reputasi, sementara komunikasi yang tepat dapat menenangkan masyarakat dan mencegah eskalasi gangguan kamtibmas. Dengan kehadiran *citizen journalism* dan dinamika ruang digital yang tidak mengenal batas waktu maupun hierarki, kemampuan Polri dalam mengendalikan narasi dan menjaga citra menjadi semakin kritis. Hal inilah yang menjadikan digital PR dan manajemen media sebagai pilar penting dalam operasi kepolisian era demokrasi digital.

Materi ini akan mengupas keterkaitan antara *Public Speaking* sebagai kemampuan dasar komunikasi pimpinan, Digital PR sebagai instrumen membangun dan mempertahankan citra institusi di ranah digital, serta manajemen media sebagai mekanisme pengendalian informasi saat operasi rutin maupun operasi krisis. Ketiganya membentuk satu ekosistem komunikasi strategis yang wajib dikuasai oleh perwira Polri agar mampu menjalankan tugas dengan profesional, responsif, dan adaptif terhadap dinamika publik.

Dengan memahami dan menguasai ketiga domain ini, peserta Sespimmen akan mampu memimpin dengan suara yang jelas, narasi yang terkendali, dan strategi media yang terukur—menjadikan

kehadiran Polri tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga kredibel dan dipercaya masyarakat.

A. Konsep dan Fungsi *Public Speaking* dalam Operasi Kepolisian

Public Speaking dalam konteks operasi kepolisian bukan sekadar kemampuan berbicara di depan umum, tetapi merupakan instrumen taktis dan strategis untuk mengendalikan situasi, membangun legitimasi, serta mengarahkan persepsi publik. Dalam operasi kepolisian—baik operasi penegakan hukum, operasi kemanusiaan, operasi kontinjensi, maupun operasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat—komunikasi lisan dari pimpinan wilayah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Hal ini karena publik sering kali menilai kinerja Polri bukan hanya dari tindakan lapangan, tetapi juga dari cara pemimpin kepolisian menjelaskan situasi, memberi jaminan keamanan, serta menyampaikan arah tindakan secara jelas dan meyakinkan.

Secara konseptual, *Public Speaking* dalam operasi kepolisian merupakan gabungan antara retorika kepemimpinan, komunikasi taktis, dan manajemen persepsi. *Public Speaking* menjadi medium untuk menyampaikan instruksi kepada anggota, menjalin koordinasi dengan stakeholder, mengelola emosi massa, serta membangun kepercayaan masyarakat. Dalam situasi krisis atau darurat, kemampuan seorang perwira menengah untuk berbicara tenang, terstruktur, dan kredibel dapat mencegah eskalasi serta meredam potensi konflik. Oleh karena itu, *Public Speaking* bukan keterampilan tambahan, tetapi merupakan bagian dari “command presence”—kehadiran kepemimpinan yang memancarkan kewibawaan, kompetensi, dan ketegasan.

1. Fungsi Informasi Operasional

Dalam operasi kepolisian, *Public Speaking* berfungsi menyampaikan informasi resmi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Ini mencakup:

- a. penjelasan situasi kepada masyarakat,
- b. rilis perkembangan operasi kepada media,
- c. penyampaian instruksi kepada personel,
- d. klarifikasi isu yang berpotensi menyesatkan publik.

Fungsi ini sangat penting dalam mencegah spekulasi, mengurangi kepanikan, dan menjaga efektivitas operasi.

	<p>2. Fungsi Pengendalian Narasi dan Persepsi Publik</p> <p><i>Public Speaking</i> adalah alat kontrol persepsi (<i>perception control</i>) dalam operasi kepolisian. Dengan narasi yang tepat, Polri dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membangun rasa aman, b. mengarahkan opini publik, c. menjelaskan alasan tindakan kepolisian, d. meredam potensi mobilisasi massa, e. menghadapi hoaks atau disinformasi. <p>Di era digital, pernyataan publik dari pimpinan kepolisian sering menjadi rujukan media dan masyarakat. Narasi yang salah atau lambat dapat membuka ruang bagi framing negatif atau rumor.</p> <p>3. Fungsi Kepemimpinan dan Moral Force</p> <p><i>Public Speaking</i> mencerminkan kualitas kepemimpinan seorang perwira. Dalam operasi, terutama yang melibatkan risiko tinggi, anggota memerlukan arahan yang tegas, jelas, dan membangkitkan motivasi. Kemampuan berbicara yang kuat dapat meningkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. moral anggota di lapangan, b. disiplin pelaksanaan tugas, c. kepercayaan anggota kepada pemimpinnya, d. kesatuan tindakan (<i>unity of effort</i>). <p>Kata-kata pemimpin sering menjadi energi psikologis yang menentukan keberhasilan operasi.</p> <p>4. Fungsi Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Sektor</p> <p>Banyak operasi kepolisian membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BNPB, dinas kesehatan, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya. <i>Public Speaking</i> menjadi sarana membangun komunikasi yang profesional dan saling percaya dalam forum koordinasi. Sikap, bahasa, dan kejelasan penyampaian memengaruhi kesinambungan kerja sama antarinstansi.</p> <p>5. Fungsi Meredam Ketegangan Sosial dan Konflik Massa</p> <p>Dalam situasi kerumunan, demonstrasi, konflik sosial, atau penanganan massa, <i>Public Speaking</i> memiliki fungsi de-escalation. Perwira yang mampu berbicara dengan bahasa yang menenangkan, tidak provokatif, dan empatik dapat:</p>
--	--

	<p>a. menurunkan emosi massa,</p> <p>b. mencegah bentrokan,</p> <p>c. menjaga keamanan tanpa kekerasan,</p> <p>d. mempercepat resolusi situasi.</p> <p>Kemampuan ini merupakan bagian dari <i>negotiated management</i>, pendekatan modern dalam pengendalian massa.</p> <p>6. Fungsi Akuntabilitas dan Transparansi Institusi</p> <p><i>Public Speaking</i> juga berperan dalam menunjukkan akuntabilitas Polri kepada publik. Melalui penjelasan yang transparan, komprehensif, dan berbasis fakta hukum, Polri dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mencegah reputational damage, terutama dalam operasi atau insiden yang sensitif.</p> <p>Dengan demikian, <i>Public Speaking</i> dalam operasi kepolisian merupakan pilar penting yang menyatukan kepemimpinan, komunikasi taktis, manajemen persepsi, dan akuntabilitas publik. Bagi perwira Sespimmen, penguasaan <i>Public Speaking</i> bukan sekadar keterampilan formal, tetapi kemampuan strategis yang menentukan apakah sebuah operasi akan dipahami, didukung, dan dipercaya oleh masyarakat. Di tengah lingkungan informasi yang cepat, penuh tekanan, dan sangat visual, pemimpin yang mampu berbicara dengan jelas, tegas, dan humanis akan menjadi faktor kunci keberhasilan operasi kepolisian.</p> <p>B. <i>Public Speaking</i> dalam Operasi Kepolisian</p> <p><i>Public Speaking</i> merupakan keterampilan esensial bagi personel kepolisian, khususnya dalam konteks operasi kepolisian yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, seperti penanganan demonstrasi, sosialisasi keamanan, atau penyelidikan lapangan. Dalam operasi kepolisian, kemampuan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi verbal, tetapi juga sebagai strategi de-eskalasi konflik, pembangunan kepercayaan publik, dan penyebaran informasi yang akurat untuk mencegah miskomunikasi yang berpotensi memicu kerusuhan. Bagi peserta didik Sespimmen Polri, yang sedang mempersiapkan diri sebagai pemimpin taktis tingkat menengah, <i>Public Speaking</i> menjadi bagian integral dari kurikulum kepemimpinan, di mana personel dilatih untuk menyampaikan pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) secara persuasif dan empati. Menurut pelatihan terbaru Korlantas Polri pada Agustus 2025, tujuan utama adalah mempersiapkan personel agar terbiasa berkomunikasi efektif dengan masyarakat, sehingga meningkatkan profesionalisme dan mengurangi persepsi negatif</p>
--	--

	<p>terhadap institusi Polri. Selain itu, studi terkini dari Wang et al. (2024) menekankan bahwa delapan keterampilan komunikasi, termasuk clarity dan empathy, dinilai tinggi oleh masyarakat dalam interaksi polisi-sipil, yang secara langsung mendukung operasi kepolisian yang berbasis komunitas. Dengan demikian, <i>Public Speaking</i> bukan sekadar seni berbicara, melainkan fondasi operasional yang mendukung transformasi Polri menuju policing yang lebih adaptif dan kolaboratif.</p> <p>Dalam operasi kepolisian, teknik <i>Public Speaking</i> harus disesuaikan dengan dinamika lapangan yang sering kali penuh tekanan, seperti saat berhadapan dengan kerumunan atau wawancara media. Strategi kunci meliputi persiapan mental untuk mengelola kecemasan, penguasaan materi untuk menghindari gugup, dan penggunaan bahasa tubuh yang netral untuk membangun rasa aman bagi audiens. Misalnya, dalam pelatihan Polres Indragiri Hulu pada September 2025, materi difokuskan pada penyampaian pesan kamtibmas secara efektif, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, dan menghindari miskomunikasi yang dapat menimbulkan salah persepsi. Psikolog yang terlibat dalam pelatihan Korlantas Polri menyoroti pentingnya mengelola emosi sebelum tampil, seperti dengan latihan bernapas untuk menjaga nada suara tenang, yang terbukti mengurangi ketegangan hingga 30% dalam simulasi operasi. Bagi peserta Sespimmen Polri, integrasi teknik ini dengan manajemen operasional taktis menjadi prioritas, sebagaimana diuraikan dalam arahan Kasespimmen pada Januari 2025, yang menekankan lima pengetahuan inti termasuk analisis hukum dan metodologi penelitian lanjutan untuk mendukung pidato strategis. Penelitian Oxholm dan Glaser (2023) dari wawancara mendalam dengan petugas polisi menambahkan bahwa diam secara strategis—sebuah elemen non-verbal dalam <i>Public Speaking</i>—memberikan informasi berharga tentang dinamika kelompok, sehingga efektif dalam identifikasi ancaman selama operasi. Pendekatan ini, yang menggabungkan verbal dan non-verbal, memastikan bahwa komunikasi tidak hanya informatif tetapi juga de-eskalatif, selaras dengan reformasi Polri pasca-Perpres No. 122/2025 tentang Percepatan Reformasi Kepolisian.</p> <p>Pengembangan <i>Public Speaking</i> dalam operasi kepolisian memberikan dampak jangka panjang, seperti peningkatan kepercayaan publik dan efisiensi tim, yang krusial bagi peserta Sespimmen Polri dalam menghadapi era digitalisasi dan ancaman hybrid. Pelatihan Polres Kepulauan Seribu pada Desember 2025 menunjukkan bahwa keterampilan ini strategis untuk pelayanan masyarakat, interaksi dengan mitra, dan pencegahan konflik, dengan narasumber menekankan peran persuasif dalam membangun citra Polri yang pro-rakyat. Secara</p>
--	---

lebih luas, inisiatif Polri sepanjang 2025, termasuk pelatihan di Riau dan Jakarta, bertujuan membangun jembatan kepercayaan melalui komunikasi empatik, yang selaras dengan temuan Humas Indonesia (2025) bahwa *Public Speaking* persuasif mengurangi ketegangan hingga 40% dalam interaksi lapangan. Bagi pemimpin menengah seperti alumni Sespimmen, pengembangan ini mendukung kolaborasi lintas lembaga, sebagaimana dibahas dalam dialog Batam November 2025 tentang kepemimpinan digital, di mana transparansi komunikasi menjadi kunci adaptasi terhadap post-truth society. Studi PowerDMS (2025) memperkuat bahwa komunikasi efektif meningkatkan pemahaman komunitas terhadap operasi polisi, mengurangi keluhan hingga 25%, dan mendukung karir jangka panjang. Oleh karena itu, Polri mendorong program berkelanjutan seperti Toastmasters adaptasi internal untuk memastikan personel tetap relevan.

C. Komunikasi Digital Terintegrasi dengan Operasi

Komunikasi Digital Terintegrasi dengan Operasi dalam konteks kepolisian, khususnya Polri, merujuk pada pemanfaatan platform digital yang menyatukan elemen kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi secara real-time untuk mendukung operasi lapangan. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tantangan era digital 4.0 dan society 5.0, di mana operasi kepolisian tidak lagi bergantung pada komunikasi konvensional seperti radio suara semata, melainkan terintegrasi dengan teknologi seperti AI, cloud computing, dan sistem data analytics. Di Polri, hal ini tercermin dalam inovasi seperti Sistem K3I (Kendali, Koordinasi, Komunikasi, Informasi) Korlantas Polri, yang menggunakan satu platform digital untuk memantau lalu lintas, mendeteksi ancaman, dan berkoordinasi antarunit. Integrasi ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data valid, mengurangi waktu respons dari menit menjadi detik, serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Untuk peserta didik Sespimmen Polri, pemahaman ini krusial karena mendukung smart policing, di mana pemimpin menengah harus mampu mengintegrasikan teknologi untuk operasi proaktif, seperti dalam pengamanan operasi besar nasional. Selain itu, studi global menunjukkan bahwa integrasi semacam ini dapat mengurangi silo data antarlembaga, sehingga operasi lintas yurisdiksi menjadi lebih efisien, sebagaimana ditemukan dalam tren teknologi kepolisian 2025 yang menekankan interoperabilitas komunikasi.

Pada tingkat operasional, Komunikasi Digital Terintegrasi memanfaatkan tools seperti Next Generation 911, body-worn cameras, dan mobile command centers yang terhubung dengan CAD (Computer-Aided Dispatch) serta RMS (Records Management System), memungkinkan pertukaran data suara,

video, dan teks secara simultan. Di Polri, contoh konkret adalah penggunaan Command Center KM 29 Korlantas Polri untuk Operasi Lilin 2025, yang mengintegrasikan CCTV, drone patrol, dan SMS blast untuk pemantauan real-time, sehingga mengoptimalkan pengamanan arus mudik Natal dan Tahun Baru. Integrasi ini tidak hanya mempercepat deteksi insiden, seperti kecelakaan atau kemacetan, tetapi juga mendukung analisis prediktif berbasis AI untuk mencegah kejahatan, seperti pola lalu lintas rawan kriminalitas. Bagi peserta Sespimmen, materi ini menekankan peran kepemimpinan dalam mengelola tantangan seperti keamanan siber dan privasi data, di mana 99% serangan ransomware terhadap kepolisian pada 2024 menargetkan sistem terintegrasi. Penelitian terbaru menyoroti bahwa platform cloud-based seperti ini dapat mengurangi downtime operasional hingga 50%, memungkinkan fokus pada tugas inti seperti pembinaan masyarakat, sambil memastikan kolaborasi dengan stakeholder seperti Kementerian Komdigi dan Jasa Marga.

Secara strategis, integrasi komunikasi digital dengan operasi mendorong transformasi Polri menuju Indonesia Emas 2045 melalui Satu Data Indonesia (SDI), di mana Divisi TIK Polri berperan sebagai walidata untuk data terintegrasi yang aman dan inovatif. Ini mencakup pengembangan VR training untuk simulasi operasi, serta kolaborasi internasional untuk menangani kejahatan siber lintas batas, seperti yang dibahas dalam Rapat Kerja Teknis TIK Polri 2024. Bagi peserta Sespimmen, konsep ini menuntut adaptasi terhadap etika digital, di mana bias AI harus diminimalkan untuk menjaga kepercayaan publik, sebagaimana tren IACP 2025 yang menekankan governance AI. Manfaat jangka panjang termasuk peningkatan efisiensi hingga 30% dalam investigasi, pengurangan biaya operasional, dan penguatan kamtibmas melalui komunikasi transparan. Namun, tantangan seperti kurva belajar teknologi dan regulasi data memerlukan pelatihan berkelanjutan, sebagaimana direkomendasikan dalam studi integratif data policing 2022-2025, yang menunjukkan bahwa agen kepolisian yang adaptif dapat mengubah risiko menjadi peluang untuk kepemimpinan inovatif.


D. Simulasi Crisis Communication (*Tabletop Exercise*)

Simulasi Crisis Communication melalui *Tabletop Exercise* (TTX) merupakan metode latihan berbasis diskusi yang dirancang untuk menguji dan memperkuat kemampuan organisasi dalam menangani komunikasi selama situasi krisis, tanpa melibatkan aksi fisik yang intensif. Dalam konteks pendidikan kepolisian seperti Sespimmen Polri, TTX menjadi alat krusial untuk membangun kesiapsiagaan perwira menengah dalam menghadapi skenario kompleks seperti demonstrasi anarkis, bencana alam, atau kebocoran informasi sensitif yang dapat


memicu ketidakstabilan sosial. Latihan ini biasanya berlangsung dalam format rapat kelompok kecil (3-6 orang) selama 90 menit hingga beberapa jam, di mana peserta memerankan peran utama seperti komandan lapangan, juru bicara publik, dan koordinator media, sambil difasilitasi oleh moderator yang menyuntikkan "injects" atau elemen kejutan seperti pertanyaan media mendadak atau ledakan informasi palsu di media sosial. Menurut panduan Everbridge tahun 2024, TTX fokus pada evaluasi rencana komunikasi kritis, termasuk bagaimana menyampaikan informasi akurat kepada karyawan, mitra, dan masyarakat untuk mencegah eskalasi krisis, yang sangat relevan bagi Polri dalam menjaga kepercayaan publik selama operasi penanggulangan huru-hara. Pendekatan ini rendah biaya dan risiko, memungkinkan peserta Sespimmen untuk mengidentifikasi celah dalam protokol komunikasi, seperti ketidaksinkronan antarunit atau ketergantungan pada saluran digital yang rentan, sebelum diterapkan di lapangan nyata.

Lebih mendalam, proses pelaksanaan TTX dalam simulasi Crisis Communication melibatkan tahapan perencanaan yang ketat, mulai dari pemilihan skenario realistis hingga debriefing pasca-latihan. Untuk peserta Sespimmen Polri, skenario dapat disesuaikan dengan konteks nasional, seperti simulasi penanganan unjuk rasa anarkis di mana tim harus mengelola komunikasi publik untuk mencegah eskalasi massa, sebagaimana dilatih dalam Apel Kasatwil Polri 2025 yang menekankan koordinasi dengan TNI dan BPBD. Fasilitator menyajikan narasi awal krisis—misalnya, kebocoran gas di kilang yang memicu evakuasi dan demonstrasi warga—lalu memicu diskusi dengan pertanyaan terbuka seperti "Bagaimana Anda merespons tuduhan pemerintah di media sosial?" atau "Siapa yang bertanggung jawab atas pesan pers resmi?" Sygnia (2025) menyarankan penggunaan injects dinamis, seperti investigasi regulasi mendadak, untuk mensimulasikan sifat tak terduga krisis, yang membantu peserta berlatih pengambilan keputusan berbasis risiko sambil memperkuat kolaborasi antarlembaga. Dalam latihan ini, elemen visual seperti peta digital atau screenshot media sosial ditambahkan untuk meningkatkan imersi, sebagaimana direkomendasikan PreparedEx (2025), sehingga perwira Polri dapat melatih pengelolaan narasi publik yang transparan dan cepat, menghindari miskomunikasi yang sering memperburuk situasi di Indonesia seperti pada kasus bencana banjir atau konflik sosial. TTX juga menekankan aspek etis, seperti memastikan pesan komunikasi inklusif bagi kelompok rentan, yang selaras dengan mandat Polri dalam menjaga stabilitas nasional.

	<p>Manfaat TTX bagi peserta didik Sespimmen Polri sangatlah luas, tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga membangun ketahanan organisasi secara holistik. Latihan ini mempertajam pengambilan keputusan di bawah tekanan, memperbaiki alur komunikasi internal-eksternal, dan mengungkap kelemahan seperti kurangnya protokol cadangan saat jaringan gagal, yang krusial dalam operasi Polri di daerah rawan konflik. Sebuah studi ISACA (2023) menunjukkan bahwa TTX dapat mengurangi elemen kejutan hingga 70% dengan simulasi skenario berbasis data nyata, seperti peningkatan insiden ransomware atau demonstrasi pascabencana, sehingga perwira dapat merancang strategi respons yang lebih adaptif. Selain itu, TTX memupuk kohesi tim melalui debriefing yang menghasilkan laporan pasca-latihan, seperti yang digunakan dalam simulasi Major Emergency Exercise Pertamina Balongan 2025 yang melibatkan Polri untuk menguji respons darurat berlapis. Bagi Sespimmen, manfaat jangka panjang termasuk peningkatan kepatuhan regulasi dan reputasi institusi, di mana komunikasi krisis yang efektif dapat mencegah polarisasi sosial, sebagaimana dibuktikan dalam latihan interagensi CISA (2024) untuk penegak hukum. Secara keseluruhan, TTX bukan sekadar latihan, melainkan investasi strategis untuk membentuk pemimpin Polri yang proaktif, siap menghadapi "permacrisis" di era digital dengan komunikasi yang presisi dan berbasis bukti.</p>
--	--

	<h2>RANGKUMAN</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Public Speaking</i> bagi perwira menengah Polri bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan senjata strategis kepemimpinan di era keterbukaan informasi. Seorang <i>Middle leader</i> Polri berada di posisi "sandwich layer" yang harus mampu menerjemahkan visi pimpinan tinggi sekaligus menyuarakan aspirasi anwil (anggota wilayah), sehingga <i>Public Speaking</i> menjadi alat utama membangun wibawa, kredibilitas (ethos), empati (pathos), dan logika berbasis fakta hukum (logos) sebagaimana diajarkan Aristoteles. Ketidakmampuan berbicara dengan baik akan langsung meruntuhkan persepsi kepemimpinan meski kinerja operasional prima. Oleh karena itu, fondasi utama adalah penguasaan prinsip "audience-centered speaking" dan penyesuaian gaya komunikasi sesuai tingkat kesiapan audiens (telling–selling–participating–delegating) agar pesan tidak hanya sampai, tetapi juga diterima dan dijalankan. 2. Struktur pesan yang efektif bagi Polri mengikuti pola retorika klasik yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional kepolisian: Pembukaan yang langsung menarik perhatian dan

	<p>menegaskan legitimasi institusi, Isi utama yang menjawab 5W1H disertai data serta peraturan perundang-undangan, dan Penutup yang berisi rangkuman, komitmen Polri serta call to action yang terukur. Teknik penyampaian harus memenuhi kaidah 3B (Benar, Baik, Bijak), mengutamakan bahasa humanis, hindari jargon teknis, serta menerapkan message mapping (3 pesan kunci x 27 kata x 9 detik) agar mudah dikutip media dan menjadi viral positif. Aspek non-verbal (55–65 % dampak) tetap menjadi penentu: postur tegap, kontak mata inklusif, variasi intonasi, dan gestur terkontrol adalah “seragam kedua” yang memancarkan disiplin dan ketenangan sebelum satu kata pun diucapkan.</p> <p>3. Etika berbicara bagi perwira Polri bersifat imperatif karena setiap ucapan adalah representasi negara hukum (rechtsstaat) yang diatur ketat dalam UU No. 2 Tahun 2002, KUHAP, dan Perpol Kode Etik. Prinsip utama meliputi kejujuran data, penghormatan praduga tak bersalah, netralitas politik, serta sensitivitas budaya-agama. Di era citizen journalism, satu kalimat yang salah dapat menjadi viral dan menggerus legitimasi institusi dalam hitungan jam. Oleh karena itu, pengelolaan persepsi (perception management) harus proaktif dengan teknik bridging, framing positif (“Polri hadir melindungi”), dan koordinasi ketat dengan Divisi Humas sebelum berbicara di depan publik atau media.</p> <p>4. <i>Public Speaking</i> profesional bagi pemimpin wilayah Polri adalah perpaduan antara retorika klasik, komunikasi modern berbasis empati, dan kesadaran etis-hukum yang tinggi. Di era society 5.0, kata-kata seorang perwira menengah memiliki daya rusak atau daya pulih yang jauh lebih besar daripada senjata api. Penguasaan fondasi ini menjadi syarat mutlak bagi peserta didik Sespimmen agar mampu tampil sebagai pemimpin yang tidak hanya disegani anggota, tetapi juga dipercaya masyarakat dan dihormati media, sehingga marwah Polri sebagai pengayom masyarakat tetap terjaga di segala situasi.</p>
--	--

	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anda ditunjuk sebagai Juru Bicara (Jubir) Polda Metro Jaya dalam sebuah Tabletop Exercise (TTX) yang mensimulasikan kerusuhan massa pasca-putusan pengadilan kontroversial di Jakarta Pusat. Pada menit ke-45 latihan, fasilitator menyuntikkan informasi bahwa beredar video editan di media sosial yang menunjukkan anggota Brimob melakukan kekerasan berlebihan terhadap demonstran, padahal video asli menunjukkan anggota sedang melindungi warga. Dalam waktu kurang dari 10 menit, video tersebut telah ditonton lebih dari 5 juta kali dan memicu demonstrasi spontan di 7 titik di Jakarta. Jelaskan langkah-langkah komunikasi krisis yang akan Anda lakukan secara berurutan dalam 3 jam pertama (golden hours), termasuk pesan kunci (key message), pilihan saluran komunikasi, dan koordinasi dengan pihak eksternal (Divisi Humas Polri, influencer, dan media mainstream). Berikan alasan mengapa urutan tersebut penting berdasarkan prinsip-prinsip crisis communication dalam TTX. (Bobot 25 poin) 2. Dalam sebuah TTX tingkat nasional di Lemdiklat Polri, Anda berperan sebagai Kapolda yang memimpin Crisis Communication Center (CCC) saat terjadi gempa bumi magnitudo 7,8 di Jawa Barat disertai tsunami lokal. Pada fase respons hari ke-2, terjadi miskomunikasi internal: Satuan Sabhara menyatakan “situasi terkendali”, sementara Satuan Brimob melaporkan “masih ada penjarahan massal”. Akibatnya, media nasional menyiarkan dua versi berita yang kontradiktif dalam waktu bersamaan, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri. Analisis akar masalah komunikasi internal tersebut dengan menggunakan kerangka “4C” (Command, Control, Communication, Coordination). Kemudian, usulkan perbaikan prosedur tetap (protap) komunikasi internal Polri berdasarkan hasil debriefing TTX agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. (Bobot 25 poin) 3. Berdasarkan pengalaman TTX yang pernah dilakukan oleh Pertamina Balongan (2025) dan Apel Kasatwil Polri 2025, jelaskan mengapa Tabletop Exercise lebih unggul dibandingkan Full-Scale Exercise dalam melatih kemampuan Crisis Communication bagi perwira menengah Polri. Berikan setidaknya 4 argumen kuat disertai contoh konkret dari kasus nyata di Indonesia dalam 3 tahun terakhir (2023–2025). Selanjutnya, sebutkan 2 kelemahan utama TTX dan bagaimana cara mengatasinya agar hasil latihan tetap valid dan dapat diukur. (Bobot 25 poin) 4. Bayangkan Anda menjadi fasilitator TTX bagi 30 peserta Sespimmen Polri dengan skenario “Kebocoran data pribadi 10

	<p>juta warga di aplikasi identitas digital kepolisian yang diretas kelompok hacker internasional”. Pada sesi debriefing (hot wash), sebagian besar peserta cenderung menyalahkan Divisi TI dan mengabaikan aspek komunikasi publik. Sebagai fasilitator, tuliskan 5 pertanyaan terbuka (open-ended questions) yang powerful yang akan Anda ajukan untuk mengarahkan diskusi agar peserta menyadari pentingnya komunikasi krisis yang transparan, empati, dan akuntabel kepada publik. Jelaskan tujuan dari masing-masing pertanyaan tersebut dan dampak psikologis yang diharapkan terhadap pola pikir peserta didik. (Bobot 25 poin)</p>
--	--